

OPEN ACCESS

Citation: Alfarizi, M.; Sari, RK. (2024). Alokasi Anggaran Pendidikan Menuju Visi SDGs di Indonesia: Wawasan Literatur Perbandingan Terhadap Negara ASEAN. Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara, 9(1), 1-33

Received: March 21, 2024

Revised: May 26, 2024

Accepted: June 3, 2024

Published: July 2, 2024

© The Author(s)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Artikel

ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN MENUJU VISI SDGs DI INDONESIA: WAWASAN LITERATUR PERBANDINGAN TERHADAP NEGARA ASEAN

Budget Allocation For Education Towards The SDGs Vision In Indonesia: A Comparative Literature Perspective On Asean Countries

Muhammad Alfarizi,¹⁾ Rini Kurnia Sari²⁾

^{1, 2)} Program Studi PJJ Manajemen, BINUS Online, Universitas Bina Nusantara, Jakarta, Indonesia

email: ¹⁾ muhammad.alfarizi@binus.ac.id, ²⁾ rini@binus.ac.id

Abstract

With the world's fourth largest population, Indonesia is experiencing significant growth. Indonesia possesses demographic dividend potential that brings economic opportunities towards becoming a developed country. Human resource preparation is key to successfully harnessing the demographic bonus of 2035. Efforts to improve the quality and accessibility of education are implemented through budget allocation as mandated by the 1945 Constitution. This study aims to analyze the education budget allocation comparison between Indonesia and the ASEAN member countries. This study provides novelty by focusing on comparing the allocation of education budgets between Indonesia and ASEAN countries through a parliamentary perspective to support the achievement of SDGs. The study adopts a qualitative method with Systematic Literature Review by analyzing 83 articles. The findings indicate that education budget allocation in Southeast Asian countries, including Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam, the Philippines, Myanmar, Cambodia, and Laos, is a crucial focus in ensuring educational quality. Despite increasing budgets annually, challenges such as disparities in educational quality, teacher shortages, and poor infrastructure remain major issues. ASEAN countries employ different approaches to budget allocation, with some focusing on decentralization, subsidies, and public investment. International support, such as that provided by the World Bank in Cambodia and Myanmar, demonstrates a commitment to improving access and quality of education. In Indonesia, budget allocations for primary, secondary, and

vocational education should be seen as investments in future human resources, with an emphasis on sustainable allocations. Improvements in diversifying budget programs and comprehensive oversight at the regional level are essential, while budget allocations for higher education and vocational training need significant increases to meet international standards, with a minimum recommendation of 2% of the national budget according to UNESCO.

Keywords: Education Budget Allocation, ASEAN, Indonesia House of Representatives.

JEL Classifications: H52; I22; I25.

I. PENDAHULUAN

Pada tahun 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara-negara anggotanya mengadopsi resolusi Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dengan tujuan keseluruhan untuk menyediakan jalan menuju perdamaian dan kemakmuran (Arzo & Hong, 2024). Agenda ini memastikan semua negara berkembang dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Pada saat yang sama, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan pendidikan, mengurangi kesenjangan dan mengatasi perubahan iklim. Semua ini diimplementasikan dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang mencakup target dan tindakan untuk mencapai tujuan ini. Pendidikan dan inovasi melalui berbagai inisiatif global telah memainkan peran penting dalam pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan di era pertumbuhan ekonomi dan masyarakat pengetahuan (Burton & Salama, 2023).



Gambar 1. 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sumber : Bappenas Republik Indonesia (2023)

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi keempat terbanyak di dunia, ditandai oleh tingginya jumlah penduduk muda dalam struktur demografinya. Menurut statistik Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, pada Desember 2023, populasi Indonesia mencapai 280,73 juta jiwa, menunjukkan peningkatan sebesar 1,61 juta jiwa dibandingkan dengan total penduduk pada Juni 2023. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) juga melaporkan bahwa jumlah pelajar di Indonesia mencapai 62,46 juta orang pada semester ganjil tahun ajaran 2023/2024.

Dari total jumlah tersebut, sebagian besar siswa berada di level Sekolah Dasar (SD), mencapai 24,04 juta orang. Pada tahun ajaran 2023/2024, terdapat 9,97 juta siswa di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Selanjutnya, ada 5,32 juta siswa yang sedang menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA). Sementara itu, jumlah siswa di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mencapai 5,08 juta orang. Tingkat Taman Kanak-kanak (TK) juga memiliki 3,74 juta siswa,

sementara di Kelompok Bermain (KB) terdapat 2,44 juta anak. Selanjutnya, jumlah siswa yang mengikuti pendidikan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) masing-masing adalah 1,6 juta orang dan 614.033 orang. Ada 158.514 siswa yang belajar di Sekolah Luar Biasa (SLB). Di sisi lain, siswa di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) berjumlah 132.510 orang, sementara siswa di Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) mencapai 52.478 orang. Menurut data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), total mahasiswa di Indonesia mencapai 9,32 juta orang.

Studi yang dilakukan oleh United Nations Population Fund (UNFPA) pada tahun 2015 memproyeksikan bahwa Indonesia akan mengalami dividen demografi antara tahun 2028 hingga 2035 (Yulistiyono et al., 2021). Dividen demografi terjadi ketika proporsi penduduk usia kerja melebihi jumlah penduduk bayi dan lanjut usia, menciptakan peluang unik untuk pertumbuhan ekonomi yang intensif. Pada tahun 2035, diperkirakan Indonesia akan memiliki angkatan kerja sebanyak 65 juta generasi muda, memberikan potensi besar sebagai penduduk produktif (Sutikno, 2020). Bonus demografi ini dapat menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk mencapai status negara maju, dengan catatan bahwa persiapan dan peningkatan sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilannya (Andari et al., 2023).

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) memainkan peran penting dalam alokasi anggaran pendidikan. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyusun dan mengalokasikan anggaran pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). DPR RI, sebagai lembaga legislatif, memiliki peran dalam memantau dan mengevaluasi penggunaan anggaran pendidikan tersebut (Wicaksono, 2021). Tujuan utama alokasi anggaran pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pemerataan akses pendidikan di seluruh Indonesia (Ulfah, 2021a). DPR atau Senat di negara-negara ASEAN memiliki peran penting dalam fungsi anggaran. DPR dan Senat di negara-negara ASEAN memainkan peran penting dalam fungsi anggaran, termasuk menyetujui dan mengesahkan APBN yang diusulkan oleh Presiden, mempertimbangkan pendapat di bidang perpajakan, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti laporan pertanggungjawaban keuangan, dan menyetujui transfer dana. Mereka mengawasi pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, serta menyelenggarakan pembahasan rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden atau DPD, khususnya mengenai otonomi daerah, hubungan pemerintahan, pengelolaan sumber daya, dan perimbangan fiskal. Peran ini memastikan akuntabilitas dan distribusi sumber daya yang adil, yang secara langsung memengaruhi anggaran daerah dan pelaksanaan proyek.

Belanja pendidikan negara memiliki urgensi yang besar dalam mencapai salah satu pilar SDG, yaitu pendidikan, karena pendidikan merupakan fondasi untuk pembangunan berkelanjutan. Investasi yang cukup dan efektif dalam pendidikan meningkatkan akses, kualitas, dan kesetaraan pendidikan, yang merupakan kunci untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesehatan, memperkuat kesetaraan gender, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Kioupi & Voulvoulis, 2019). Dengan memprioritaskan belanja pendidikan, negara dapat menciptakan masyarakat yang terampil, inovatif, dan berdaya saing, yang pada gilirannya akan membantu mencapai target-target SDG terkait pendidikan serta memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan. Anggaran pendidikan Indonesia merupakan bagian penting dari upaya pemerintah untuk meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan di negara ini. Meskipun telah mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, anggaran pendidikan Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan (Saputra, 2018). Sebagian besar anggaran pendidikan masih dialokasikan untuk gaji dan tunjangan pegawai, meninggalkan jumlah yang

lebih kecil untuk investasi dalam infrastruktur pendidikan, pelatihan guru, dan pengembangan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan global dan lokal.

ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), sebagai organisasi antar-parlemen regional, mempromosikan praktik terbaik dan kerjasama antar anggotanya dalam hal informasi dalam penyusunan rancang anggaran negara (Firdaus & Kresnawati, 2023). AIPA berfungsi sebagai platform untuk berbagi praktik terbaik, memfasilitasi dialog, dan mendorong kolaborasi, namun partisipasi dalam diskusi tidak wajib bagi semua negara anggota. Berbeda dengan diskusi AIPA pada umumnya, fokus AIPA memungkinkan dilakukannya pembahasan yang lebih terarah mengenai isu-isu peran perlemen termasuk terkait anggaran pendidikan, sehingga berpotensi menghasilkan solusi yang lebih disesuaikan dan kebijakan yang berdampak terhadap kebutuhan pendidikan di kawasan ASEAN. Oleh karena itu, peran AIPA dalam pembahasan anggaran pendidikan menawarkan pendekatan yang lebih terspesialisasi dan berpotensi efektif dibandingkan dengan diskusi ASEAN yang lebih luas. AIPA terdiri dari 10 negara anggota: Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Studi perbandingan proses alokasi anggaran Indonesia dengan negara-negara ASEAN Inter-Parliamentary Assembly memberikan perspektif holistik dan memungkinkan identifikasi best practices (Rüland, 2013).

Kesenjangan riset muncul pada belum terkajinya alokasi anggaran Indonesia dalam pendidikan secara bertingkat baik dasar, menengah dan tinggi. Studi perbandingan yang memperhatikan anggaran pendidikan antar negara ASEAN juga belum terakomodir. Sehingga studi ini bertujuan untuk mengkaji alokasi anggaran pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang dilakukan Pemerintah-Parlemen baik dan perbandingannya dengan negara ASEAN lainnya. Originalitas studi ini menjadi titik fundamental kajian sistematis pertama yang mengulas perbandingan parlemen negara Indonesia dan ASEAN dalam perhatian alokasi anggaran pendidikan. Studi ini memberikan kontribusi teoritis dengan menguraikan alokasi anggaran pendidikan di Indonesia untuk mencapai Visi SDGs. Dengan membandingkan kebijakan ini dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya, penelitian ini melibatkan wawasan literatur untuk mendukung pemahaman mendalam terhadap implementasi praktis. Kontribusi teoritisnya terletak pada pengembangan konsep-konsep pendidikan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Secara praktis, studi ini memberikan landasan bagi perumusan kebijakan anggaran yang efektif dan berkelanjutan, memperkuat peran Indonesia dalam mencapai SDGs, serta mempromosikan kolaborasi regional di bidang pendidikan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Mandat UUD 1945 Dalam Alokasi Anggaran Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan bangsa. UUD 1945, sebagai konstitusi negara, memberikan mandat khusus dalam alokasi anggaran pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Alokasi anggaran pendidikan menjadi aspek penting dalam pembangunan pendidikan suatu negara, termasuk Indonesia. Mandat Konstitusi, khususnya dalam UUD 1945, memberikan dasar hukum yang kuat untuk memastikan pendanaan yang memadai dan berkualitas dalam sektor pendidikan (Thamrin, 2020). Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hal ini menandakan komitmen konstitusi Indonesia untuk memberikan akses pendidikan yang merata kepada seluruh rakyatnya (Fadhil & Sabic-El-Rayess, 2021). Oleh karena itu, alokasi anggaran pendidikan haruslah mencerminkan komitmen ini.

Anggaran pendidikan merujuk pada alokasi anggaran yang ditujukan untuk mendukung fungsi pendidikan, yang dialokasikan melalui berbagai kementerian dan lembaga pemerintah serta melalui dana transfer ke daerah (Kamaludin, 2023a). Ini mencakup biaya gaji pendidik dan mendukung penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Sumber anggaran untuk belanja pendidikan bagi siswa berasal dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, yayasan, orang tua, dan entitas lainnya. Anggaran pendidikan dari pemerintah berasal dari tiga sumber utama, yakni Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Anggaran pendidikan yang dialokasikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) merupakan sumber dana dari Pemerintah Pusat, sementara dana yang berasal dari daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Lengkong et al., 2019). Alokasi anggaran pendidikan terdiri dari dua komponen utama, yaitu alokasi dari pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Dana transfer ke daerah meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), tambahan Dana Alokasi Umum, dan dana khusus untuk otonomi pendidikan (Safira & Wibowo, 2021).

Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa "negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional." (Juanda, 2021). Mandat ini menunjukkan komitmen kuat negara dalam memajukan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan mandat konstitusi, pemerintah Indonesia menetapkan beberapa prinsip kebijakan pendanaan pendidikan, seperti keadilan, kesetaraan, dan keseimbangan. Artinya, alokasi anggaran pendidikan harus mencakup berbagai tingkat pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi, serta mengakomodasi kebutuhan pendidikan di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil dan terpinggirkan (Santoso, 2021). Alokasi anggaran pendidikan dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tingkat nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tingkat regional. Prinsip-prinsip konstitusi tercermin dalam penyusunan APBN dan APBD, yang mencakup anggaran untuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi serta program-program pendukung seperti beasiswa dan bantuan pendidikan (Ahmad, 2020).

Alokasi anggaran pendidikan di Indonesia telah mengalami fluktuasi selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, alokasi anggaran pendidikan mencapai 20,04% dari APBN, di atas batas minimal yang diamanatkan UUD 1945 (Sulasmu et al., 2023). Walaupun angka ini masih belum ideal jika dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya, kontribusinya pada peningkatan kualitas pendidikan cukup baik. Ini terlihat dari jumlah penduduk yang mendapatkan pendidikan, sebagaimana yang dilaporkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Menurut data yang dirilis oleh OECD yang dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (www.kemendikbud.go.id), pada tahun 2000, hanya 39% dari penduduk usia 15 tahun yang bersekolah di tingkat SMP atau SMA. Namun, pada tahun 2018, persentase tersebut meningkat drastis menjadi 85% (Rustiningrum & Digdowiseiso, 2023). Capaian ini menunjukkan kemajuan yang signifikan yang telah dicapai oleh Pemerintah dalam sektor pendidikan.

Meskipun terdapat mandat konstitusi yang jelas, implementasi alokasi anggaran pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya, dimana alokasi anggaran pendidikan mungkin tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan pendidikan yang ada (Ilham et al., 2023). Selain itu,

terdapat masalah efisiensi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pendidikan, yang kadang-kadang mengakibatkan pemborosan atau penyalahgunaan dana (Duanti & Arifin, 2020). Diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Korelasi Sektor Pendidikan, Kebijakan Anggaran dan Pencapaian SDGs

Pada 25 September 2015, di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), para pemimpin dunia secara resmi mendukung Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai kesepakatan pembangunan global (Kushnir & Nunes, 2022). Sebanyak 193 kepala negara, termasuk Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, meratifikasi Agenda SDGs. Dengan tema "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan", SDGs mencakup 17 Tujuan dan 169 Target yang menjadi rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku mulai 2016 hingga 2030). Tujuannya adalah untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs bersifat universal, sehingga semua negara, termasuk negara maju, memiliki kewajiban moral untuk mencapai tujuan dan target tersebut (Nawn, 2015).

Salah satu tujuan utamanya adalah SDG 4, yang berfokus pada pendidikan berkualitas. SDG 4 bertujuan memastikan inklusi dan kesetaraan dalam pendidikan serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang (Ambariyanto & Utama, 2020). Pendidikan berkualitas dianggap sebagai kunci untuk mencapai banyak tujuan lainnya, seperti pengurangan kemiskinan (SDG 1), kesetaraan gender (SDG 5), dan pekerjaan yang layak serta pertumbuhan ekonomi (SDG 8) (Chapariha, 2022). Pendidikan memberdayakan individu dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berkontribusi secara efektif dalam masyarakat dan perekonomian, serta untuk beradaptasi dengan perubahan global. Dengan demikian, investasi dalam pendidikan adalah investasi strategis untuk mencapai seluruh SDGs.

Korelasi antara sektor pendidikan, kebijakan anggaran, dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sangat erat dan saling memengaruhi. Pendidikan berkualitas adalah pilar utama dalam mencapai berbagai target SDGs, seperti mengurangi kemiskinan, mempromosikan kesejahteraan, dan mencapai kesetaraan gender (Kestin et al., 2023). Kebijakan anggaran yang tepat dan memadai dalam sektor pendidikan memainkan peran penting dalam memastikan akses yang lebih luas, peningkatan kualitas, dan pemerataan kesempatan pendidikan. Anggaran pendidikan yang cukup memungkinkan pembangunan infrastruktur yang memadai, peningkatan kapasitas guru, dan pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Alokasi anggaran yang efektif dan strategis dalam sektor pendidikan dapat mempercepat pencapaian SDGs. Sebaliknya, kurangnya investasi dalam pendidikan dapat menghambat kemajuan dan memperburuk ketimpangan sosial. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan pendidikan dan kebijakan anggaran sangat krusial untuk mencapai target SDGs secara menyeluruh dan berkelanjutan.

3. Fungsi Anggaran DPR RI Dalam Mendukung Ekosistem Pendidikan Berkelanjutan

Fungsi Anggaran DPR RI merupakan salah satu kewenangan penting yang dimiliki, di mana DPR berhak untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) yang diajukan oleh Presiden. Ini meliputi penentuan alokasi dana untuk berbagai sektor seperti

pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan lain sebagainya (Soeparno, 2022). DPR RI memiliki kewenangan untuk mengawasi penggunaan dana APBN agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Jalal, 2020). Hal ini dilakukan melalui mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pemantauan terhadap pelaksanaan program-program yang telah dianggarkan. Gambar 2 merupakan Siklus Penyusunan APBN secara umum.



Gambar 2. Siklus Penyusunan APBN
 Sumber. Direktorat Jenderal Anggaran (2023)

Proses pembahasan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah dimulai dengan penyampaian RUU APBN oleh Presiden, yang harus dilakukan paling lambat 60 hari sebelum dimulainya Tahun Anggaran. Selanjutnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR melakukan pembahasan mendalam terhadap RUU APBN bersama pemerintah. Komisi-komisi DPR juga membahas RUU APBN sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dalam Rapat Kerja (Raker). Setelah itu, Banggar menyampaikan laporan hasil pembahasannya kepada Rapat Paripurna DPR. Rapat Paripurna kemudian membahas RUU APBN secara umum dan memberikan persetujuan untuk dilanjutkan ke pembahasan tingkat selanjutnya. Pembahasan tingkat II dilakukan dengan membahas RUU APBN secara rinci, pasal demi pasal dan ayat demi ayat. Akhirnya, Rapat Paripurna DPR mengambil keputusan final terhadap RUU APBN, apakah disetujui atau tidak. RUU APBN yang disetujui kemudian disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang APBN (Wahyuni & Hernusa, 2021).

Lembaga DPR RI memiliki peran penting dalam mendukung ekosistem pendidikan Indonesia melalui fungsi anggaran. DPR memainkan peran kunci dalam menentukan alokasi sumber daya untuk pendidikan dan penelitian, yang merupakan fondasi dari inovasi dan kemajuan (Tegnan, 2018). Anggaran ini tidak hanya mendukung pendidikan formal melalui pendanaan untuk sekolah dan universitas, tetapi juga mendukung pendidikan informal dan nonformal, serta penelitian dan pengembangan inovasi. DPR RI melalui fungsi anggaran memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas (Khairunnisa & Rahmatunnisa, 2022). Ini mencakup pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, serta program pendidikan vokasi.

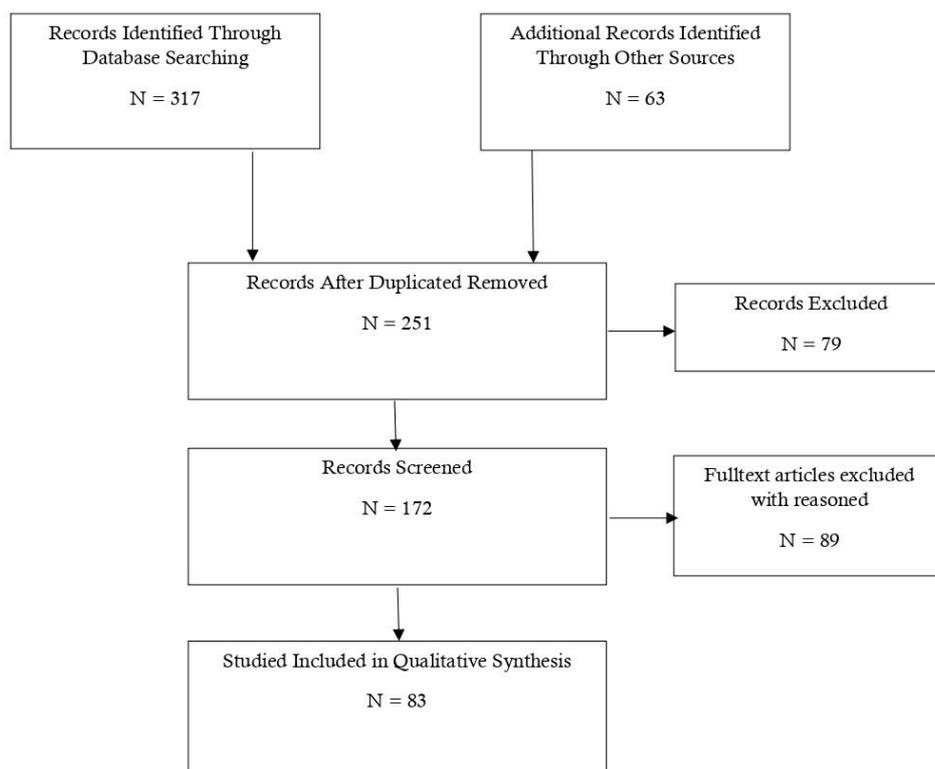
III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan Systematic Literature Review (SLR) dengan proses revidi terstruktur. Studi ini harus menggunakan SLR untuk memastikan analisis yang komprehensif dan objektif. SLR memungkinkan peneliti mengumpulkan dan mengevaluasi semua bukti yang relevan secara sistematis, mengurangi bias, dan meningkatkan validitas hasil. Dengan SLR, perbandingan

alokasi anggaran pendidikan di berbagai negara ASEAN dapat dilakukan secara terstruktur dan transparan, membantu mengidentifikasi praktik terbaik dan area untuk perbaikan. Metodologi ini juga cocok untuk menghimpun literatur kajian untuk mengembangkan analisa topik yang sangat jarang diteliti lebih lanjut dan dengan sudut pandang berbeda.

Proses tinjauan literatur sistematis melibatkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan (Page, McKenzie, Bossuyt, Boutron, Hoffmann, Mulrow, Shamseer, Tetzlaff, Akl, et al., 2021). Penelitian ini menggunakan Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) (Selcuk, 2019). Hal ini mencakup (i) menentukan tujuan penelitian; (ii) menetapkan protokol peninjauan dengan mengidentifikasi kata kunci, basis data, dan kriteria pemilihan literatur; (iii) pencarian literatur dengan menelusuri database literatur dan menyaring hasil pencarian berdasarkan kriteria sebelum menyempurnakan kriteria eksklusi dan inklusi; (iv) mengambil literatur dengan menyusun tabel ringkasan, mengevaluasi kualitas literatur, dan memasukkan data bibliografi (Selcuk, 2019). Bagan proses PRISMA dari tinjauan literatur sistematis ditunjukkan pada Gambar 3.

PRISMA adalah pedoman yang digunakan untuk melaporkan hasil dari sebuah SLR, di mana peneliti secara sistematis mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis bukti-bukti dari berbagai studi yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian tertentu. Jadi, PRISMA adalah bagian integral dari SLR, membantu memastikan transparansi dan kualitas laporan dalam proses SLR.



Gambar 3. Bagan Penyaringan Literatur PRISMA

Sesuai dengan tujuan penelitian, studi ini melakukan pemeriksaan komprehensif terkait proses alokasi anggaran pendidikan Indonesia dan Negara ASEAN. Studi ini disusun berdasarkan analisis cermat terhadap penelitian sebelumnya untuk mengidentifikasi titik fokus utama yang mengarah pada studi alokasi anggaran pendidikan. Studi ini meninjau artikel-artikel penelitian yang terkait dengan alokasi anggaran di Indonesia dan negara-negara ASEAN dalam ruang

lingkup studi mereka dari tahun 2010 hingga 2023. Kata kuncinya baik dalam Bahasa Indonesia dan Inggris meliputi “Alokasi Anggaran Pendidikan Indonesia”, “SDGs Indonesia”, “Parlemen AIPA”, “Alokasi Anggaran Pendidikan Negara” dengan penambahan Nama Negara AIPA (Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja), “Peran Parlemen dalam Anggaran Pendidikan”.

Menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi penting dalam penelitian Systematic Literature Review (SLR) karena membantu memastikan bahwa studi yang dimasukkan relevan dan sesuai dengan pertanyaan penelitian (Page et al., 2022). Kriteria ini mengarahkan seleksi studi yang akan disertakan dalam analisis, memastikan validitas dan keandalan hasil. Tanpa kriteria yang jelas, risiko bias dan ambiguitas dapat muncul, mengurangi kepercayaan pada kesimpulan penelitian. Kriteria inklusi dan eksklusi membantu memfokuskan upaya penelitian pada sumber daya yang paling relevan dan berharga, memungkinkan peneliti untuk membuat kesimpulan yang lebih kuat dan dapat diandalkan. Kriteria inklusi dan eksklusi lebih detail disampaikan pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi Literatur

No	Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
1.	Artikel secara eksplisit membahas parlemen Indonesia dalam alokasi anggaran pendidikan	Artikel merupakan Prosiding dan Review
2.	Artikel secara eksplisit membahas parlemen negara AIPA dalam alokasi anggaran pendidikan	Artikel diterbitkan dalam bab buku, laporan, literatur abu-abu
3.	Artikel diterbitkan dari database Science Direct, Emeralds, Springer, Taylor & Francis dan SINTA Indonesia	Artikel tersebut merupakan duplikat
4.	Artikel diterbitkan antara tahun 2010-2023	Artikel penerbitan sebelum tahun 2010
5.	Artikel harus bentuk jurnal	

Data yang dikumpulkan mencakup artikel dari publikasi Science Direct, Emeralds, Springer, Taylor & Francis dan SINTA Indonesia. Untuk memastikan validitas dan efektivitas tinjauan literatur, hanya artikel penelitian yang diterbitkan dalam bahasa Inggris yang dihitung untuk penelitian ini. Penelitian ini memilih makalah yang (i) judul, (ii) abstrak, dan (iii) isinya berkaitan dengan kata kunci penelitian. Penting untuk digarisbawahi bahwa rangkaian penelitian dijalankan dua kali untuk meningkatkan keandalan penelitian. Seperti yang digambarkan pada Gambar 1, jumlah total artikel yang diidentifikasi pada tahap pertama adalah 380 Artikel. Namun, 129 artikel dikeluarkan karena duplikasi dan tidak terkait dengan perspektif penelitian. Dalam proses penyaringan dari 172 artikel terkait, hanya 88 yang memenuhi syarat untuk dianalisis. Hasilnya menggambarkan evolusi kajian yang pesat dalam studi terkait parlemen dan alokasi anggaran pendidikan dalam dua dekade terakhir dan semakin pentingnya studi tersebut dalam memberikan jalan penting bagi perencanaan dan pengelolaan anggaran negara Indonesia dalam bidang tersebut. Teknik analisis dalam SLR melibatkan identifikasi, seleksi, evaluasi kritis, dan sintesis temuan dari penelitian yang relevan. Langkah-langkahnya meliputi perumusan pertanyaan penelitian, pencarian literatur, penyaringan studi berdasarkan kriteria inklusi, penilaian kualitas, dan analisis data untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan dapat diandalkan (Page, McKenzie, Bossuyt, Boutron, Hoffmann, Mulrow, Shamseer, Tetzlaff, & Moher, 2021).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penganggaran Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan bangsa. Di Indonesia, pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen) menjadi fondasi bagi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas (Sukmayadi & Yahya, 2020). Alokasi anggaran pendidikan menjadi faktor krusial dalam memastikan terselenggaranya Dikdasmen yang optimal (Waruwu, 2021). Permasalahan muncul dengan masih banyak output/outcome yang perlu perbaikan. Skor PISA (Programme for International Student Assessment) masuk peringkat 68 tidak mencapai RPJMN 2024 dan dibawah standar OECD, HCI (Human Capital Index) peringkat 79 dari 157 negara, kompetensi guru yang masih belum akseleratif dengan peradaban pendidikan, dan ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah merupakan sedikit dari indikator kinerja pendidikan yang masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah (Ismail et al., 2021). Persoalan guru honorer masih menjadi isu krusial dalam dunia pendidikan Indonesia, bahkan hingga memasuki tahun anggaran 2024 (Dito & Pujiastuti, 2021).

Analisis dari Tren Neraca Pendidikan dari Tahun 2016 hingga 2021 (Tabel 2) dari Direktorat Anggaran Kementerian Keuangan RI (2023) menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran pendidikan disalurkan melalui TKDD (Transfer Ke Daerah dan Desa), diikuti oleh BPP dan Pembiayaan Anggaran (Muhammad & Wiguna, 2023). TKDD berperan penting dalam mendukung anggaran pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. TKDD mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa, yang sebagian besar dialokasikan untuk sektor pendidikan. Dana ini membantu pemerintah daerah membiayai operasional sekolah, pembangunan fasilitas pendidikan, serta penyediaan sumber daya pendidikan yang diperlukan. Melalui DAK Fisik, dana difokuskan pada pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sekolah. Sementara itu, DAK Non-Fisik, seperti Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), mendukung biaya operasional harian sekolah, termasuk pembelian buku dan alat tulis, serta gaji tenaga pendidik. Selain itu, DAU memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan sesuai prioritas daerah masing-masing.

Dalam hal nilai nominal, alokasi anggaran pendidikan dalam APBN terus meningkat dari Rp370.810,2 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp460.316,8 miliar pada tahun 2019, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 7,5%. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan signifikan dalam outlook anggaran pendidikan menjadi Rp547.833,2 miliar, atau meningkat sebesar 19,0% dari tahun sebelumnya, hal ini terutama disebabkan oleh penyesuaian dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 (Kuraesin, 2024). Untuk menjaga proporsi anggaran pendidikan tetap sebesar 20% dari belanja negara, penyesuaian lebih lanjut terhadap alokasi anggaran pendidikan menjadi suatu kebutuhan.

Tabel 2. Tren Alokasi APBN Pada TKDD (Dalam Triliun)

Tahun	APBN	Pembagian TKDD
2016	370,8	234,79
2017	406,1	258,05
2018	431,7	272,21
2019	460,3	299,19
2020	547,8	281,41
2021	550,0	299,1
2022	542,8	290,5
2023	608,3	305,0
2024 (Usulan)	665,0	346,6

Sumber: Data diolah (2024).

Dana pendidikan yang dialokasikan melalui anggaran Pemerintah Pusat pada tahun 2023 mencapai Rp612,2 triliun. Alokasi ini dirancang untuk mendukung berbagai program, termasuk implementasi Kartu Indonesia Pintar(KIP) dan Dana Bos. Anggaran pendidikan yang dialokasikan melalui TKDD dalam APBN tahun 2023 mencapai Rp461,78 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa pendanaan untuk pendidikan dasar dan menengah diserahkan sepenuhnya kepada kewenangan Pemerintah Daerah (Ma'sum et al., 2023). Mereka memiliki otonomi penuh dalam mengatur dan mengelola anggaran tersebut sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pendidikan tingkat Sekolah yang diketahui secara detail oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan bagian dari desentralisasi anggaran pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya pendidikan di tingkat daerah.

Pada tahun 2024, dana yang dialokasikan untuk pendidikan mencapai Rp. 665,0 triliun (20% dari APBN), dengan fokus utama pada perluasan wajib belajar melalui Program Indonesia Pintar serta dukungan operasional lainnya seperti Dana BOS, BOP PAUD, Sertifikasi, dan Beasiswa (Al Asari & Hendra, 2024). Penyerahan kewenangan pengelolaan anggaran Dikdasmen pada Daerah sebetulnya sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan sesuai prinsip otonomi daerah. Akan tetapi, dengan kenyataan disparitas pendidikan antar daerah timpang, maka efektivitas anggaran untuk peningkatan kualitas pendidikan menjadi pertanyaan baru (Aliva & Ilhamsyah, 2021). Disparitas pendidikan dasar dan menengah antar daerah menciptakan ketidakseimbangan dalam akses, kualitas, dan kesetaraan pendidikan. Permasalahan utama yang mengakibatkan efektivitas APBN dalam dukungan pendidikan daerah rendah adalah lemahnya perencanaan penganggaran dan akuntabilitas transparansi anggaran pendidikan baik tingkat pemerintah daerah maupun sekolah (Febrianto & Esther, 2023). Kurangnya perencanaan penganggaran dapat menyebabkan alokasi dana yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan, sehingga menyebabkan pemborosan atau ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan yang mendesak (Nafindra & Rifqi, 2022). Sementara itu, rendahnya tingkat akuntabilitas dan transparansi mengakibatkan sulitnya memantau dan mengevaluasi penggunaan anggaran secara efektif (Sudarmono et al., 2020). Tanpa adanya mekanisme yang jelas untuk pertanggungjawaban dan pelaporan anggaran secara detail, risiko penyalahgunaan dan korupsi juga meningkat. Hal ini terbukti dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Pengelolaan Dana BOS di Kemendikbud Tahun 2020 yang menemukan banyak permasalahan dalam pengelolaan dana BOS pada sejumlah daerah. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah dan DPR

RI untuk memastikan alokasi APBN Pendidikan TKDD untuk Dikdasmen sampai hingga tangan sekolah dan dipergunakan seefisien sesuai prioritas kebutuhan primer sekolah.

2. Perbandingan Negara ASEAN Dalam Alokasi Anggaran Pendidikan Dasar dan Menengah

Negara anggota ASEAN selama ini saling mendukung dalam perhatian peningkatan kualitas pendidikan negara Asia Tenggara. Berbagai agenda strategik dilakukan dalam mendorong end result keunggulan calon SDM membangun 'ASEAN as Single Community' yang maju. Negara ASEAN memandang bahwa Dikdasmen merupakan titik fundamental dalam membangun fondasi pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan individu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya dan memasuki dunia kerja (Aguilar, 2017). Pendidikan dasar dan menengah berperan penting dalam mempersiapkan generasi masa depan yang memiliki karakter, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk membangun bangsa yang maju dan sejahtera.

Malaysia memprioritaskan pengeluaran untuk pendidikan, dan mengalokasikan sebagian besar anggaran nasionalnya kepada Kementerian Pendidikan. Pada Anggaran 2024, Kementerian menerima RM58,7 miliar dari hasil persetujuan anggaran Parlemen Malaysia, lebih banyak RM3,5 miliar dibandingkan tahun 2023 (Loganathan et al., 2023). Alokasi anggaran ini sebagian digunakan untuk memastikan lingkungan belajar yang layak dan tunjangan guru untuk kualitas pengajaran yang lebih baik. Kondisi ini berbeda dengan Indonesia yang variasi pengeluaran antara pendidikan dasar, menengah pertama, dan menengah atas tergantung pada wilayahnya. Pendekatan Malaysia terhadap pendanaan pendidikan juga mencakup desentralisasi keuangan di tingkat sekolah. Pemerintah telah mengakui sekolah-sekolah yang dipilih dengan otonomi keuangan, dikenal sebagai Pusat Tanggungjawab (PTj) atau Pusat Autonomi (Khairi et al., 2023). Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan otonomi sekolah melalui otoritas pengambilan keputusan independen untuk mengelola sumber daya keuangan. Pengakuan sekolah sebagai PTj didasarkan pada kinerja keuangan yang baik, dan memungkinkan sekolah untuk menghabiskan berdasarkan kebutuhan mereka melalui alokasi keuangan yang diizinkan dan prosedur (Syahirah et al., 2023). Perbedaan antara Malaysia dan Indonesia dalam alokasi anggaran pendidikan dasar dan menengah terletak pada pendekatan dan mekanisme pengelolaan keuangan. Di Indonesia, sebagian besar anggaran pendidikan disalurkan melalui Kementerian Pendidikan, dengan fokus pada alokasi melalui Dana Alokasi Khusus Daerah, yang kemudian diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk pengelolaan di tingkat sekolah. Pendekatan ini mengacu pada prinsip desentralisasi, yang memberikan otonomi kepada Pemerintah Daerah dalam mengatur anggaran sesuai kebutuhan lokal. Namun, tantangan muncul terkait disparitas pendidikan antar daerah dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Pemerintah Malaysia mengalokasikan sebagian besar anggaran nasionalnya langsung kepada Kementerian Pendidikan, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesejahteraan guru. Pendekatan ini mencakup desentralisasi keuangan di tingkat sekolah, di mana sekolah yang berprestasi keuangan diakui sebagai Pusat Tanggungjawab (PTj) atau Pusat Autonomi, memberikan sekolah otonomi langsung dari pusat, total dan menyeluruh dalam pengelolaan sumber daya keuangan. Ini mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih independen dalam penggunaan dana pendidikan, dengan fokus pada kebutuhan dan prioritas sekolah yang spesifik. Perbedaan ini bisa dimaklumi karena kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang cukup besar dan prinsip desentralisasi yang dipegang teguh

Brunei Darussalam mendukung pendidikan dasar dan menengah melalui kombinasi belanja pemerintah, lembaga yang didanai pemerintah, dan sistem pendidikan terstruktur (Mail et al., 2019). Pada tahun 2012, belanja pemerintah untuk pendidikan menyumbang 3,3% dari PDB negara tersebut (Jones, 2016). Hal ini mencakup pendanaan untuk beberapa sekolah dasar dan menengah yang didanai pemerintah, lembaga teknis dan kejuruan, serta lembaga pendidikan swasta yang tersebar di seluruh negeri. Sistem pendidikan di Brunei Darussalam direstrukturisasi secara signifikan antara tahun 2009 dan 2011 (Salleh & Laxman, 2014). Sistem baru ini memperkenalkan enam tahun sekolah dasar, dimulai pada usia enam tahun, yang mengarah pada Penilaian Sekolah Rendah (Penilaian Sekolah Rendah). Tergantung pada kemampuan akademisnya, siswa kemudian melanjutkan ke sekolah menengah selama empat atau lima tahun, yang berpuncak pada ujian tingkat Brunei–Cambridge atau London Edexcel International GCE O (Mumin, 2023). Pendekatan terstruktur ini memastikan pendidikan komprehensif bagi siswa, mempersiapkan mereka untuk studi lebih lanjut atau dunia kerja. Perbedaan dalam alokasi anggaran pendidikan dasar dan menengah antara Brunei Darussalam dan Indonesia sangat mencolok. Hal ini dikarenakan sistem pendidikan terstruktur dan berstandar Internasional membuat terjadinya kombinasi belanja pemerintah, lembaga yang didanai pemerintah, dan sistem pendidikan terstruktur. Kemandirian sekolah sangat dituntut dalam pembiayaan, walaupun mendapat dukungan negara. Berbeda dengan Indonesia dengan sekolah milik pemerintah mendapat dukungan penuh dari Pemerintah, hanya swasta saja yang memiliki kemandirian dengan segala keterbatasan dan problematik yang ada. Hanya segelintir sekolah di Indonesia bisa membangun kemandirian finansial di Indonesia, itupun merupakan sekolah swasta besar. Jika kita lihat, fokus anggaran Indonesia hingga saat ini berfokus pada revitalisasi infrastruktur, perbaikan kurikulum, pendukung pendapatan tenaga pendidik serta isu fundamental pendidikan negara berkembang. Brunei Darussalam selangkah lebih depan pada internasionalisasi pendidikan, konsistensi mutu pendidikan dan masa depan pendidikan yang akseleratif dengan Society 5.0.

Singapura dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Hal ini tidak lepas dari komitmen pemerintahnya dalam mengalokasikan anggaran pendidikan yang besar. Dua puluh persen dari anggaran tahunan nasional dialokasikan untuk pendidikan, khususnya dalam subsidi pendidikan negeri dan swasta yang dibantu pemerintah bagi warga Singapura (Frattarola, 2023). Negara ini memiliki program khusus untuk mendukung dikdasmen seperti Edusave untuk tabungan keluarga tidak mampu dan MOE Kindergarten Funding Scheme untuk subsidi biaya TK bagi keluarga berpenghasilan rendah (Tun et al., 2023). Guru di Singapura dihormati dan mendapatkan gaji yang kompetitif (Poon, 2022). Parlemen Singapura sangat memprioritaskan urusan pendidikan dalam diskusi anggaran nasional (Ho & Lee, 2022). Mereka berpandangan bahwa sistem pendidikan yang berkualitas tinggi dan memberikan peluang bagi semua siswa untuk mencapai potensi mereka hanya dengan anggaran pendidikan yang besar dan merata. Perbedaan dalam alokasi anggaran pendidikan dasar dan menengah antara Singapura dan Indonesia terletak pada beberapa aspek. Singapura mengalokasikan 20% dari anggaran tahunan nasionalnya secara merata untuk pendidikan, sementara Indonesia memiliki tren kenaikan anggaran namun masih menghadapi disparitas pendidikan dasar dan menengah antar daerah. Pemerintah Singapura harus diakui lebih serius pada penghormatan guru dan pengembangan sistem pendidikan yang berkualitas tinggi, sedangkan Indonesia menghadapi tantangan dalam perencanaan penganggaran, efektivitas akuntabilitas, dan transparansi dalam penggunaan anggaran pendidikan.

Alokasi anggaran Thailand untuk pendidikan dasar dan menengah secara tradisional terfokus pada pendidikan dasar (Chankrajang & Muttarak, 2017). Laporan menunjukkan bahwa pada tahun 2020, sekitar 35% dialokasikan untuk pendidikan dasar dan dibandingkan pendidikan tinggi yang sebesar 21% (Sripokangkul, 2020). Parlemen Thailand atau nama lain Rathasapha menginisiasi program pendidikan gratis 15 Tahun dari TK hingga SMA dengan alokasi anggaran pendidikan 18% atau \$90 miliar (Pothisiri et al., 2020). Akan tetapi, persoalan muncul pada anggaran pendidikan mereka tidak termasuk mendukung Guru dan memunculkan kekhawatiran bahwa alokasi anggaran mungkin tidak mencerminkan kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan (Gauthier & Punyasavatsut, 2019). Perbedaan utama antara Thailand dan Indonesia dalam alokasi anggaran pendidikan dasar dan menengah terletak pada fokus pengalokasian dan proporsi anggaran yang dialokasikan untuk setiap tingkat pendidikan. Alokasi anggaran untuk pendidikan dasar di Thailand tampak lebih tinggi dibandingkan dengan pendidikan menengah. Berbeda dengan Indonesia yang disesuaikan dengan kinerja sekolah dan pembagian alokasi rancangan Pemerintah Daerah.

Vietnam telah membuat kemajuan signifikan dalam alokasi anggaran untuk pendidikan dasar dan menengah, dan menjadikan hal tersebut sebagai prioritas nasional. Sejak 2008, pemerintah telah menyetujui 20% dari anggarannya untuk pendidikan, mencerminkan komitmen yang kuat terhadap sektor tersebut. Investasi ini telah menghasilkan pencapaian yang signifikan, termasuk tingkat penyelesaian sekolah dasar yang tinggi, kesetaraan gender, rasio siswa-guru yang rendah, dan tingkat keluar sekolah yang rendah. Kebijakan "Fundamental School Quality Level Standards" telah memastikan akses universal ke pendidikan dan memenuhi kondisi minimal di setiap sekolah dasar. Akan tetapi, tantangan akses kualitas pendidikan menengah masih cukup vital pada kawasan perdesaan Vietnam. Ada juga kesenjangan dalam akses dan penyelesaian pendidikan untuk siswa perempuan dan etnis minoritas. Untuk mengatasi masalah ini, Parlemen Vietnam bersama eksekutif mengembangkan Education Development Strategic Plan (EDSP) untuk memodernisasi sistem pendidikan, menyelaraskannya dengan standar kualitas regional dan internasional, dan memastikan kesetaraan sosial dan kesempatan belajar seumur hidup. Tujuan spesifik mencakup capaian pendidikan anak usia dini dan kesehatan yang universal, meningkatkan kualitas pendidikan menengah rendah, memperkuat sekolah menengah rendah untuk etnis minoritas, dan merestruktur sistem pendidikan kejuruteraan untuk lebih mempersiapkan siswa dengan keterampilan profesional untuk pasar tenaga kerja internasional. Ini mencakup sembilan solusi strategis yang berfokus pada memodernisasi manajemen pendidikan, memperluas jaringan institusi pendidikan, mengembangkan sumber daya manusia, dan memperkuat investasi dan pelatihan. Vietnam telah menetapkan komitmen yang kuat dengan mengalokasikan 20% dari anggarannya untuk pendidikan sejak 2008, sementara Indonesia belum mencapai tingkat tersebut serta terkesan tidak stabil. Dengan demikian, Vietnam menunjukkan komitmen yang lebih kuat dan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan akses, kualitas, dan kesetaraan pendidikan, sementara Indonesia masih perlu meningkatkan upaya dalam hal tersebut.

Filipina telah melakukan upaya signifikan dalam mengalokasikan anggarannya untuk pendidikan dasar dan menengah, dengan fokus pada peningkatan efisiensi dan hasil dari pengeluaran pendidikan. Pemerintah dengan dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Filipina telah menunjukkan koherensi antara pengeluaran pendidikan dan kebijakan serta prioritas yang diidentifikasi, yang sangat penting untuk memberikan hasil bagi rakyat Filipina (Mokher

& Mella-Alcazar, 2024). Inisiatif kebijakan yang menonjol adalah penambahan dua tahun pendidikan menengah ke dalam Pendidikan Dasar yang didukung oleh pemerintah di tahun 2016, yang telah mengarah pada pertumbuhan relatif dalam pengeluaran untuk pendidikan menengah dibandingkan dengan pendidikan dasar (Budhrani et al., 2018). Struktur pengeluaran pendidikan di Filipina melibatkan campuran sumber daya tingkat nasional dan sumber daya yang dikumpulkan dan dikelola oleh Local Government Units (LGUs). Sumber daya nasional dialokasikan ke Departemen Pendidikan (DepEd) melalui Anggaran Umum Tahunan, dengan penyesuaian yang dibuat berdasarkan perubahan dalam lingkungan makroekonomi negara dan kapasitas pengeluaran dari tahun-tahun sebelumnya (Sarabia-Panol & Sison, 2016). Sumber daya LGU untuk pendidikan berasal dari dana yang dialokasikan dari kekayaan negara dan otoritas pajak khusus pada properti real - Special Education Fund (SEF). Filipina telah melihat penurunan persentase pengeluaran Pendidikan Dasar yang dikelola oleh DepEd, dari sekitar 90% pada tahun 2013 menjadi sekitar 77% pada tahun 2017. Bagian pengeluaran Pendidikan Dasar yang danaan oleh LGUs juga telah menurun dari sekitar 6% pada tahun 2010 menjadi sekitar 3% pada tahun 2017 (Tung et al., 2020). Pergeseran ini menunjukkan pergerakan menuju pendekatan yang lebih desentralisasi terhadap pengalokasian dana pendidikan, dengan LGUs memainkan peran yang lebih signifikan dalam pengeluaran pendidikan. Pemerintah juga telah memberikan investasi publik dalam pendidikan menengah melalui subsidi kepada siswa untuk menghadiri institusi swasta, Education Service Contracting (ESC) untuk siswa Sekolah Menengah Pertama, dan Vouchers for Senior High School (SHS) (Budhrani et al., 2017). Inisiatif ini bertujuan untuk memperluas Sekolah Menengah dan Sekolah Menengah Atas dengan memanfaatkan investasi swasta yang ada, dengan niat untuk menyediakan tempat sekolah tambahan dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan memperluas sistem publik. Perbedaan utama antara Filipina dan Indonesia dalam alokasi anggaran pendidikan dasar dan menengah terletak pada struktur pengeluaran dan pendekatan pada pihak eksternal. Indonesia betul-betul mengusahakan anggaran secara penuh untuk mendukung pendidikan dasar dan menengah. Filipina memberikan kesempatan penuh pada pihak swasta dalam Investasi program pendidikan mereka dalam tujuan menjadi bagian dari kesuksesan pendidikan disana.

Negara Myanmar melakukan beberapa reformasi kebijakan anggaran dengan penghapusan biaya sekolah untuk pendidikan dasar dan menengah, pendidikan dasar yang wajib, penambahan 79.000 guru, ekspansi program bantuan untuk siswa miskin, dan pemberian dana blok ke sekolah (Soe et al., 2019). Reformasi pendidikan mulai menunjukkan hasilnya, dengan peningkatan pengeluaran yang signifikan. Selain itu, Myanmar sedang beralih dari sistem pemerintahan terpusat ke sistem yang lebih desentralisasi berdasarkan Konstitusi 2008, dengan langkah-langkah awal untuk menetapkan badan legislatif dan eksekutif di tingkat Negara dan Daerah (Thein & Akita, 2019). Alokasi anggaran untuk Kementerian Pendidikan (MoE) mencapai MMK 2,685 miliar pada tahun 2019/20, mewakili sekitar 8,4% dari anggaran Uni (Zobrist & McCormick, 2017). MoE menjadi pemegang anggaran kelima terbesar setelah Kementerian Listrik dan Energi, Perencanaan dan Keuangan, dan Pertahanan. Anggaran Departemen Pendidikan Dasar mewakili 74,6% dari total anggaran MoE; Departemen Pendidikan Tinggi mewakili 17%; sementara Departemen Pendidikan Teknikal, Vokasional, Pendidikan dan Pelatihan mewakili 6,8%. Kombinasi ketiga ini mencakup 98,4% dari total anggaran MoE untuk tahun 2019/2020. Pada tingkat Kementerian, tingkat pelaksanaan anggaran telah sangat baik, berkisar antara 92% hingga

111% selama periode 2015/2016 hingga 2018/2019. Pada tahun 2019/2020, lebih dari 28% dari alokasi anggaran MoE digunakan untuk pengeluaran modal dengan sisa 72% untuk pengeluaran saat ini. Alokasi ini mewakili peningkatan dalam investasi modal, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan antara alokasi anggaran pendidikan dasar dan menengah di Myanmar dan Indonesia sangat mencolok dalam hal pendekatan kebijakan dan praktik pelaksanaannya. Di Indonesia, pendanaan pendidikan dasar dan menengah lebih didominasi oleh alokasi dari APBN dengan tingkat desentralisasi yang signifikan, di mana pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola dana tersebut sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal. Sementara itu, Myanmar mengalami transformasi kebijakan dengan fokus pada reformasi pendidikan, termasuk penghapusan biaya sekolah untuk pendidikan dasar dan menengah, serta ekspansi program bantuan untuk siswa miskin.

Alokasi anggaran Kamboja untuk pendidikan dasar dan menengah didukung oleh pendanaan yang signifikan dari Bank Dunia. Bank Dunia menyetujui kredit sebesar US\$60 juta melalui International Development Association, bersama dengan hibah sebesar US\$9,25 juta dari GPE, dengan total US\$69,25 juta (Ogisu & Williams, 2016). Pendanaan ini diarahkan untuk General Education Improvement Project (GEIP), sebuah inisiatif lima tahun yang bertujuan untuk meningkatkan akses yang adil terhadap pendidikan dasar dan menanggapi krisis yang memengaruhi sistem pendidikan di Kamboja (Pellini & Bredenberg, 2015). Proyek ini sejalan dengan Rencana Strategis Pendidikan Kamboja, yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia berkualitas tinggi dan beretika untuk menumbuhkan masyarakat berbasis pengetahuan (Zimmermann & Williams, 2016). Kegiatan proyek ini meliputi penerapan program manajemen berbasis sekolah, memberikan pengembangan kapasitas kepada guru dan staf kependidikan, meningkatkan lingkungan belajar, dan mendukung pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah, laboratorium sains, dan sekolah pendidikan khusus (Lang, 2023). Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja sektor pendidikan melalui program reformasi pendidikan, pengembangan profesional berkelanjutan, dan pengembangan jalur karir mengajar. Tujuan proyek ini termasuk memastikan bahwa anak-anak yang paling rentan dapat bersekolah dan belajar, serta memfasilitasi pengembangan Rencana Strategis Pendidikan 2024–2028 (Ravet & Mtika, 2024). Pembiayaan Bank Dunia, bersama dengan hibah GPE, mewakili komitmen yang signifikan untuk memperkuat pembelajaran dan akses terhadap pendidikan di Kamboja, mengatasi tantangan yang teridentifikasi, dan membangun kembali negara yang lebih baik. Keberadaan Majelis Nasional Kamboja sebagai parlemen Kamboja dalam persoalan pendidikan sering bertindak sebagai pengingat dan pengawas dalam berbagai proyek strategis pemerintahan (Em et al., 2022).

Laos menghadapi tantangan dalam alokasi anggaran untuk pendidikan dasar dan menengah. UU Pendidikan (2015) menyatakan 18% dari anggaran nasional harus digunakan untuk pendidikan (Noonan & Phommalangsy, 2020). Sayangnya, alokasi sebenarnya tidak mencukupi. Angka ini telah menurun dari 15,8% pada tahun 2015/2016 menjadi 13,1% pada tahun 2020. Keterbatasan anggaran ini memengaruhi kualitas pendidikan (Guo, 2020). Sekolah mengalami kekurangan sumber daya yang diperlukan, sehingga berdampak pada pelatihan guru, materi pembelajaran, dan infrastruktur. Hingga Laos harus menerima dukungan dari organisasi seperti UNICEF, yang mengadvokasi peningkatan investasi di bidang pendidikan (Boualaphet & Goto, 2020). Perbedaan antara alokasi anggaran pendidikan dasar dan menengah di Kamboja-Laos dan Indonesia mencakup beberapa aspek kunci. Indonesia menunjukkan peningkatan alokasi anggaran mandiri dari tahun ke tahun,

mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan pendidikan. Di sisi lain, Kamboja dan Laos menghadapi tantangan dalam alokasi anggaran pendidikan. Meskipun adanya dukungan dari lembaga internasional seperti Bank Dunia dan UNICEF, alokasi anggaran yang rendah dan penurunan persentase anggaran nasional yang dialokasikan untuk pendidikan di Laos menciptakan kendala dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Di Kamboja, meskipun ada sumber pendanaan eksternal yang signifikan, keterbatasan dalam alokasi anggaran nasional dapat membatasi upaya meningkatkan pendidikan.

3. Alokasi Anggaran Program Pendidikan Tinggi Indonesia

Pendidikan tinggi sebagai sektor jasa memainkan peran penting dalam pengembangan pribadi, sosial dan ekonomi secara global. Institusi pendidikan tinggi semakin diakui sebagai kontributor dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB (Asnawi & Setyaningsih, 2020). Di antara 17 SDGs, pendidikan berkualitas (SDG4) diidentifikasi sebagai tujuan penting yang berfokus pada kesetaraan akses terhadap pendidikan tinggi dan mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap individu (Hauptman Komotar, 2020). Perguruan Tinggi mempunyai tanggung jawab penting: menjadi kekuatan pendorong penting dalam mencapai semua SDG melalui pelatihan, produksi pengetahuan, dan inovasi (Nabaho et al., 2020). Pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam menciptakan individu berkualitas yang siap untuk memasuki lapangan kerja (Qi et al., 2022). Namun, tantangan dalam pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia adalah kurangnya dukungan anggaran dari pemerintah.

Anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan tinggi di Indonesia dinilai cukup rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia hanya mengalokasikan sekitar 0,3% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan tinggi (Alwi & Gunarto, 2022). Rekomendasi dari UNESCO menyarankan bahwa anggaran minimal untuk pendidikan tinggi seharusnya mencapai 2% dari APBN (Fachrudin & Sholihin, 2021). Pada tahun 2023, APBN Indonesia mencapai Rp3000 triliun. Dengan demikian, anggaran total untuk pendidikan nasional mencapai Rp612,2 triliun, di mana Rp305 triliun disalurkan ke daerah dan dana desa. Sekitar 2,7% dari APBN, atau sekitar Rp29 triliun, dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) untuk pendidikan tinggi (Rofiq & Setiyadi, 2023). Dari alokasi tersebut, hanya 0,9% yang diperuntukkan bagi riset dan pendidikan tinggi, dan sebagian besar berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pengelolaan anggaran tersebut juga harus dilakukan dengan adil antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Padahal program pendidikan tinggi saat ini semakin banyak dan penting seperti revitalisasi infrastruktur, program Kampus Merdeka, Kartu Indonesia Pintar-Kuliah, Beasiswa Non KIP dan tunjangan dosen (Romdloni, 2021).

Keterbatasan alokasi anggaran ini mengakibatkan berbagai konsekuensi yang dapat memengaruhi kualitas dan aksesibilitas pendidikan tinggi di Indonesia. Pertama, kurangnya dana dapat menghambat pengembangan infrastruktur pendidikan, seperti pembangunan gedung perkuliahan, laboratorium, dan perpustakaan, yang penting untuk menunjang proses pembelajaran dan riset (Aminuddin et al., 2021). Kedua, keterbatasan dana juga dapat mempengaruhi ketersediaan beasiswa dan bantuan keuangan bagi mahasiswa yang membutuhkannya, sehingga membatasi akses mereka terhadap pendidikan tinggi (Alifa & Sulaeman, 2023). Selain itu, rendahnya alokasi anggaran juga dapat memengaruhi kualitas tenaga pengajar dan peneliti di perguruan tinggi (Ulfah, 2021b). Dengan anggaran terbatas,

sulit bagi perguruan tinggi untuk memperoleh dan mempertahankan tenaga pengajar berkualitas serta mendukung penelitian yang inovatif dan berdampak.

DPR RI memainkan peran penting dalam menanggapi anggaran Pendidikan Tinggi Indonesia dengan menekankan pentingnya pemerataan kualitas pendidikan. Mereka berpendapat bahwa anggaran harus dialokasikan secara efektif untuk memastikan bahwa semua institusi pendidikan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri dan swasta, mendapatkan dukungan yang setara (Yaniar et al., 2022). Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dalam kualitas pendidikan dan memastikan bahwa semua mahasiswa, terlepas dari latar belakang mereka, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. DPR RI juga menekankan pentingnya investasi dalam infrastruktur pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat (Aminuddin et al., 2021).

4. Perbandingan Negara ASEAN Dalam Dukungan Anggaran Pendidikan Tinggi

ASEAN memainkan peran penting dalam mendukung pendidikan tinggi di kawasan ASEAN, meskipun mempunyai kewenangan non-legislatif dan resolusi yang tidak mengikat (Rüland, 2013). ASEAN bertindak sebagai platform dialog dan kolaborasi antar negara anggota, memberikan ruang bagi anggota parlemen untuk terlibat satu sama lain dan dengan pengamat, seperti Parlemen Eropa. Majelis ini memfasilitasi pertukaran pandangan dan gagasan tentang berbagai isu, termasuk pendidikan tinggi, melalui Majelis Umum dan forum lainnya (Firdaus & Kresnawati, 2023).

Dukungan Malaysia terhadap pendidikan tinggi, khususnya dalam hal alokasi anggaran, merupakan pendekatan multifaset yang bertujuan untuk memberdayakan warganya melalui pendidikan. Anggaran tahun 2024 mengalokasikan RM16,3 miliar kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, menandai peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya yang berjumlah RM15,3 miliar (Mahamad et al., 2016). Alokasi ini dipandang sebagai manfaat komprehensif baik bagi pendidik maupun peserta didik, yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung pendidikan tinggi dalam menghadapi tantangan perekonomian. Terdapat batasan biaya pendaftaran untuk universitas negeri sebesar RM1.500 mulai Januari 2024, bertujuan untuk membuat pendidikan tinggi lebih mudah diakses oleh siswa, terutama mereka yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Alokasi sebesar RM250 juta untuk mengganti dan memperluas jangkauan Wi-Fi di semua universitas negeri, memberikan mahasiswa dan staf akses yang lebih baik ke layanan internet cepat (Keerio & Ahmad, 2023). Perbedaan alokasi anggaran pendidikan tinggi antara Indonesia dan Malaysia mencerminkan prioritas dan strategi masing-masing negara dalam menghadapi tantangan pendidikan. Indonesia mengalokasikan hanya sekitar 0,3% dari APBN untuk pendidikan tinggi, yang dapat membatasi akses dan kualitas pendidikan tinggi. Sementara itu, Malaysia menunjukkan komitmen yang lebih besar dengan meningkatkan alokasi anggaran secara signifikan dari tahun ke tahun. Selain itu, Malaysia mengambil langkah konkrit untuk memperluas akses pendidikan tinggi dengan menetapkan batasan biaya pendaftaran dan meningkatkan infrastruktur digital dalam program pendidikan jarak jauh berkualitas.

Singapura mendukung pendidikan tinggi melalui pendekatan komprehensif yang mencakup alokasi anggaran yang signifikan, inisiatif kebijakan, dan berbagai sistem dukungan bagi mahasiswa (Marginson, 2011). Komitmen pemerintah terhadap pendidikan terlihat dari investasi besar yang dilakukan di sektor pendidikan, yang menyumbang porsi besar terhadap belanja pemerintah. Pada tahun 2019, Kementerian Pendidikan Singapura menghabiskan

hampir S\$1,3 miliar, mewakili lebih dari 16% pengeluaran pemerintah tahunan, atau sekitar 2,5% PDB (McGreal & Olcott, 2022). Investasi ini mencerminkan keyakinan yang kuat terhadap pendidikan sebagai bentuk investasi sosial yang meningkatkan sumber daya manusia individu dan bangsa, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Dukungan pemerintah terhadap pendidikan tinggi juga mencakup pendanaan bagi pekerja Singapura untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam perekonomian global. The Lifelong Learning Endowment Fund telah ditambahkan sebesar USD 357 juta, sehingga total dana menjadi USD 3,3 miliar (J. Tan, 2021). Selain itu, kredit sebesar S\$500 (sekitar USD 370) per warga negara Singapura dengan tujuan pengembangan pelatihan skill future. Kemudian, \$2,14 miliar dicadangkan untuk melatih tenaga kerja guna memajukan rencana ekonomi Singapura dan mendukung upaya penelitian universitas, sementara \$940 juta disisihkan untuk membekali mahasiswa dari Institutes of Technical Education dengan pelatihan teknis dan relevan untuk industri untuk mendapatkan pekerjaan (C. Y. Tan, 2022). Perbedaan alokasi anggaran dengan Indonesia masih terlihat dari komposisi anggaran. Indonesia belum bisa melampaui alokasi anggaran pendidikan tinggi Singapura yang mencapai 16% dari pengeluaran pemerintah tahunan pada sektor pendidikan pada tahun 2019.

Brunei Darussalam mendukung Perguruan Tingginya melalui kombinasi alokasi anggaran dan inisiatif strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mempromosikan penelitian, dan mengatasi tantangan seperti pengangguran di kalangan lulusan (Purwaningrum et al., 2014). Kementerian Pendidikan memainkan peran penting dalam dukungan ini, dengan memberikan perkiraan pengeluaran dan rencana strategis untuk sektor pendidikan tinggi. Rencana ini mencakup upaya untuk menyeimbangkan permintaan dari pasar tenaga kerja dengan pasokan lulusan di berbagai bidang studi, yang menunjukkan fokus pada penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Rencana strategis Kementerian tahun 2018–2022 menguraikan lebih lanjut arah dan prioritas pendidikan tinggi di Brunei Darussalam, termasuk peningkatan akses terhadap pendidikan tinggi dan pengembangan sistem pendidikan nasional untuk abad ke-21 (Shahrill & Keasberry, 2021). Selain alokasi anggaran, Kementerian Pendidikan juga proaktif dalam mengatasi masalah pengangguran dengan mendorong universitas untuk bermitra dengan industri dan mengkomersialkan penelitian akademis. Pendekatan ini bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bagi lulusan. Tidak terlalu terlihat perbedaan antara Indonesia dan Brunei Darussalam dalam alokasi anggaran pendidikan tinggi. Hanya saja, irisan strategis anggaran lebih ditekankan untuk pendidikan tinggi berbasis industri sejak lama untuk mengatasi pengangguran dan penguatan riset inovasi. Indonesia lebih berfokus pada pemerataan akses pendidikan tinggi bagi semua keluarga di Indonesia dan peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Pada tahun 2019, reformasi pendidikan tinggi baru dimulai dengan konsep kampus merdeka dengan dorongan akselerasi pendidikan berbasis minat mahasiswa baik industri, riset, pengabdian dan internasionalisasi.

Thailand mendukung sektor pendidikan tinggi melalui kombinasi alokasi anggaran nasional, pembiayaan lokal, dan bantuan internasional. Untuk tahun fiskal 2019, anggaran Kementerian Pendidikan sebesar 487.646 juta baht, dengan belanja pendidikan mencapai hampir 20% anggaran nasional atau 4% PDB (Tuangratananon et al., 2019). Alokasi ini jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain, termasuk negara berkembang seperti Tiongkok, Indonesia, Malaysia, Meksiko, Filipina, Inggris, dan Perancis. Pembiayaan lokal, khususnya

di daerah perkotaan, juga berkontribusi terhadap anggaran pendidikan, dimana hingga 28,1% anggaran pendidikan di wilayah Administrasi Metropolitan Bangkok disediakan oleh pembiayaan lokal (Sangiumvibool & Chonglertham, 2017). Selain itu, Thailand menerima pinjaman dan bantuan teknis untuk pendidikan dari Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia (Jarernsiripornkul & Pandey, 2018). Indonesia masih belum bisa melampaui Thailand dalam alokasi pendidikan tinggi, walaupun Indonesia masih jauh lebih mandiri dalam alokasi anggaran pendidikan tinggi dengan tidak menerima pinjaman khusus pendidikan.

Vietnam mendukung perguruan tinggi melalui kombinasi peningkatan alokasi anggaran, reformasi kelembagaan, dan pengembangan sumber daya manusia. Pemerintah Vietnam telah memprioritaskan peningkatan pendidikan dalam negeri, dengan target peningkatan 10% setiap tahunnya dalam pendaftaran universitas dan menyelaraskan sistem pendidikan tinggi dengan standar global (Hoang, 2019). Hal ini menyebabkan peningkatan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan, liberalisasi keterlibatan sektor swasta, dan mendorong partisipasi asing dalam pengembangan layanan pendidikan dan pelatihan. Institusi-institusi di Vietnam semakin tertarik untuk memperluas peluang kemitraan dengan institusi-institusi luar negeri, khususnya institusi Amerika, seiring dengan pemberian otonomi yang lebih besar kepada institusi-institusi tersebut dalam mengelola manajemen pendidikan tinggi. Data Kementerian Pendidikan dan Pelatihan Vietnam Tahun 2020 menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah pelajar Vietnam yang belajar di luar negeri, dengan sekitar 190,000 pelajar Vietnam yang belajar di luar negeri pada tahun ajaran 2019-2020 (Võ & Laking, 2020). Tren ini terus berlanjut ketika banyak keluarga meningkatkan pendapatan rumah tangga mereka dan berupaya mengirim anak-anak mereka ke luar negeri untuk memastikan mereka memiliki akses terhadap peluang pendidikan terbaik. Tujuan studi luar negeri antara lain Jepang, Amerika Serikat, Australia, Kanada, Inggris, China, dan lain-lain.

Myanmar sedang melakukan transisi dari sistem pemerintahan terpusat ke sistem desentralisasi, dengan langkah awal yang diambil untuk membentuk badan legislatif dan eksekutif di tingkat Negara Bagian dan Wilayah (Kandiko Howson & Lall, 2020). Myanmar telah mengupayakan kolaborasi dengan lembaga pendidikan tinggi internasional dan organisasi penelitian. Ini termasuk program pelatihan, konferensi, lokakarya, seminar, program penelitian bersama, program beasiswa, dan pertukaran mahasiswa dan Faculty Member Perguruan Tinggi Myanmar. Pada bulan Agustus 2020, Kementerian Pendidikan memberikan otonomi tertentu kepada 16 universitas, sehingga mereka dapat mengelola kegiatan mereka secara efektif dan meningkatkan kualitas pengajaran dan penelitian (Esson & Wang, 2018). Langkah ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk mendemokratisasi sistem universitas Myanmar.

Laos telah mencapai kemajuan dalam memperluas akses terhadap pendidikan dasar selama dua dekade terakhir, yang sangat penting untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 4 dan transisi dari status Negara Tertinggal (LDC) pada tahun 2024 (Chanthy & Saynasine, 2020). Namun, kualitas pendidikan masih menjadi masalah, dengan kesenjangan pembelajaran yang signifikan dan variasi hasil pembelajaran yang luas di berbagai kelompok sosio-ekonomi dan etnis. Sayangnya Laos tidak memiliki kejelasan sistem alokasi dana pada perguruan tinggi yang membuat inkonsistensi atau tantangan dalam perencanaan pengembangan perguruan tinggi .

Kamboja melalui Kementerian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (MoEYS) memainkan peran sentral dalam menyediakan layanan pendidikan di semua tingkatan, mulai dari

pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga pendidikan tinggi (Moxom & Noonan, 2020). Pemerintah telah meningkatkan alokasi anggarannya secara signifikan ke MoEYS, meningkat dua kali lipat dari 1,813 miliar KHR pada tahun 2015 menjadi 3,738 miliar KHR pada tahun 2020, yang setara dengan sekitar 3,4% PDB (Un & Sok, 2022). Peningkatan ini disebabkan oleh komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi, serta pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pengumpulan pendapatan selama bertahun-tahun. Pemerintah Kerajaan Kamboja (RGC) telah memprioritaskan sektor pendidikan, khususnya dalam Strategi Persegi Panjang fase IV (RS IV) yang menekankan pada pengembangan sumber daya manusia sesuai bidang minat dan bakat. Hal ini mengarah pada reformasi strategis yang berfokus pada kualitas dosen, kurikulum dan materi pembelajaran, serta lingkungan. Pemerintah juga telah meningkatkan pendanaan untuk operasional perguruan tinggi, memastikan pemerataan pendanaan berdasarkan wilayah, jumlah mahasiswa, dan faktor lainnya (Sok & Bunry, 2021).

Perbedaan alokasi anggaran pendidikan tinggi antara Indonesia dengan Vietnam, Myanmar, Laos dan Kamboja tidak terlalu mencolok. Indonesia, dengan alokasi sekitar 0,3% dari APBN untuk pendidikan tinggi, jauh di bawah rekomendasi UNESCO yang menyarankan minimal 2% dari APBN. Di sisi lain, Vietnam telah meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan, dengan target peningkatan 10% setiap tahunnya, serta mendorong partisipasi swasta dan asing dalam pengembangan layanan pendidikan. Myanmar, sedang dalam proses transisi menuju desentralisasi, telah memberikan otonomi kepada universitas untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan penelitian. Laos mengalami tantangan dalam kualitas pendidikan, dengan kesenjangan pembelajaran yang signifikan, namun tidak memiliki kejelasan dalam alokasi dana untuk perguruan tinggi. Dengan demikian, Indonesia masih lebih baik dalam mendukung pendidikan tinggi dibanding keempat negara yang masih belum dapat memperkuat ekosistem pendidikan tinggi bagi masyarakatnya.

5. Tantangan dan Strategi Indonesia Alokasi Anggaran Pendidikan Pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Indonesia, sebagai negara penandatanganan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB, telah berkomitmen untuk memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan adil untuk semua (SDG 4) (Thamrin, 2020). Hal ini memerlukan alokasi dan penyerapan anggaran pendidikan yang efektif. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengalokasikan dan menyerap anggaran pendidikan untuk mencapai SDGs. Kinerja anggaran keseluruhan di tujuh sektor terkait SDG, termasuk pendidikan, menunjukkan rata-rata pengeluaran yang terlalu rendah (*underspending*) sebesar 10% dan pengeluaran berlebih (*overspending*) hingga 12% (Saputra, 2018). Pada laporan kredibilitas anggaran dalam tujuan SDGs oleh International Budget Partnership (2023) menunjukkan pada sektor edukasi sudah cukup membaik dengan alokasi 5% dan deviasi rerata *underspending* anggaran sebesar -1%. Hal ini dikarenakan tren anggaran yang tidak konsisten dalam upaya menaikkan indeks kinerja SDGs. Alokasi anggaran pendidikan Indonesia telah mencapai 20% dari APBN, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun angka ini masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara (Rohman & Widowati, 2024). Di samping itu, distribusi anggaran pendidikan belum merata antar daerah dan jenjang pendidikan. Alokasi anggaran antar daerah bisa tidak merata, sehingga daerah yang lebih kaya menerima bagian yang lebih besar (Omara, 2016). Hal ini merugikan siswa di daerah miskin, menghambat akses mereka terhadap pendidikan berkualitas. Persoalan birokrasi tingkat Daerah yang rumit dapat menunda pencairan dana

ke sekolah, sehingga menghambat pelaksanaan program pendidikan secara tepat waktu (Kamaludin, 2023b). Indonesia dengan wilayah yang sangat luas menghambat sekolah daerah terpencil dalam kapasitas administratif anggaran. Alokasi anggaran pendidikan juga masih terfokus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah berbasis desentralisasi yang berpotensi disalahgunakan, sedangkan jenjang pendidikan tinggi masih kekurangan anggaran dalam memenuhi kebutuhan program peningkatan kualitas pendidikan tinggi Indonesia.

Dari kajian alokasi anggaran pendidikan setiap negara ASEAN, terdapat titik fokus pencapaian dan permasalahan pencapaian SDGs berbeda. Terdapat kemajuan di sebagian besar negara ASEAN, khususnya dalam meningkatkan akses terhadap pendidikan. Beberapa negara seperti Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam menjadi “pemimpin” regional dalam hal pencapaian mutu pendidikan untuk target SDGs. Indonesia, Thailand dan Filipina masih dalam posisi mengejar peran besarnya dalam pencapaian SDGs melalui sektor pendidikan. Sementara Vietnam, Laos, Kamboja dan Myanmar masih bergelut dalam persoalan keterbatasan sumber daya, pelatihan guru dan kualitas pendidikan.

Pemerintah Indonesia perlu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam upaya mencapai target SDGs melalui alokasi anggaran yang memadai. Terdapat beberapa strategi dalam alokasi anggaran pendidikan:

- a. Menaati Amanat Undang-Undang Dasar 1945 Secara Progresif
- b. Pemerintah mengalokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan, sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (4). Bahkan jika dimungkinkan harus ada komitmen peningkatan alokasi anggaran setiap tahun untuk memastikan kecukupan anggaran dalam mendukung sistem pendidikan nasional.
- c. Memperhatikan Prioritas dan Kebutuhan
Alokasi anggaran pendidikan difokuskan pada program-program prioritas, seperti:
 - i. Peningkatan kualitas dan hak profesional guru dan tenaga kependidikan
 - ii. Penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai
 - iii. Perluasan akses pendidikan ke daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T)
 - iv. Peningkatan mutu subsektor pendidikan menengah dan tinggi khusus vokasi
 - v. Penguatan program kampus Merdeka dan Merdeka belajar dengan prinsip diversifikasi dan pertumbuhan dana berkelanjutan untuk kemandirian Sekolah/Perguruan Tinggi
- d. Melibatkan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pengambilan Keputusan
Pemerintah melibatkan masyarakat ataupun mendengar penuh pendapat DPR RI dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait alokasi anggaran pendidikan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa anggaran pendidikan digunakan secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan masyarakat.
- e. Memperkuat Perencanaan dan Penganggaran
Pemerintah dan DPR RI perlu bersama melakukan perencanaan dan penganggaran yang matang, serta mempercepat proses pencairan anggaran. Pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas pelaksana program di daerah, termasuk dalam hal penyusunan program, pengadaan barang dan jasa, serta pelaporan keuangan.
- f. Memperkuat Monitoring dan Evaluasi
Pemerintah Bersama DPR RI perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program-program pendidikan untuk memastikan bahwa anggaran digunakan

secara efektif dan efisien. Komisi X DPR RI bersama Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN) DPR RI dapat memperluas wewenang untuk analisa realisasi lapangan alokasi anggaran baik didaerah maupun pada tingkat perguruan tinggi secara langsung.

- g. Membangun Sistem Pengaduan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi Pemerintah membangun sistem pengaduan dan pencegahan tindak pidana korupsi yang terintegrasi pada sistem dana BOS sekolah maupun Sistem Informasi Anggaran, Keuangan dan Aset Perguruan Tinggi yang terhubung dengan pengawasan Inspektorat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI untuk memastikan bahwa anggaran pendidikan digunakan secara akuntabel dan transparan.

- h. Penguatan Peran Komisi X dan Badan Anggaran DPR RI dalam Rumusan Alokasi dan Pengawasan Pengelolaan Anggaran Pendidikan

DPR RI sebagai lembaga legislatif memiliki peran penting dalam memastikan alokasi dan penyerapan anggaran pendidikan yang optimal. DPR RI perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses alokasi dan penyerapan anggaran pendidikan. Sebagai wakil rakyat, DPR RI dapat mengadakan konsultasi publik dengan berbagai pihak terkait pendidikan, seperti akademisi, guru, orang tua murid, dan organisasi masyarakat sipil. Melalui forum ini, DPR dapat mendengar langsung aspirasi dan masukan dari berbagai stakeholders untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan responsif terhadap kebutuhan pendidikan. DPR RI dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja penggunaan anggaran pendidikan secara berkala. Hal ini dapat dilakukan dengan penyuaaran pengembangan sistem pemantauan alokasi anggaran Nasional yang terbuka bagi DPR RI dan Publik untuk memantau secara real time. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan dalam penyerapan anggaran, serta menyusun rekomendasi perbaikan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana pendidikan. Keberadaan kantor perwakilan daerah atau Dapil seperti DPD RI diperlukan juga oleh DPR RI untuk memastikan anggota DPR RI beserta staf ahli dan Sekjen DPR RI dapat lebih mengontrol permasalahan pendidikan maupun isu lain lebih komprehensif di daerah pemilihan. Strategi-strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran pendidikan di Indonesia dialokasikan dan diserap dengan cara yang efektif dan efisien, dengan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan akses pendidikan di seluruh Indonesia.

V. KESIMPULAN

Pendidikan adalah pilar utama pembangunan bangsa, dengan pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen) sebagai fondasinya. Indonesia berkomitmen untuk menyediakan pendidikan berkualitas sebagai bagian dari SDGs. Analisis tren anggaran pendidikan dasar dan menengah dengan pengelolaan dibawah difokuskan pada perluasan wajib belajar, dukungan operasional sekolah, dan otonomi daerah dalam mengelola anggaran. Disparitas pendidikan antar daerah, perencanaan penganggaran yang lemah, dan akuntabilitas yang rendah menjadi tantangan dalam memastikan efektivitas penggunaan anggaran. Alokasi anggaran pendidikan tinggi juga kurang, dengan hanya 0,3% dari APBN pada 2019, jauh di bawah rekomendasi UNESCO. Hal ini berakibat pada keterbatasan infrastruktur, beasiswa bagi mahasiswa miskin dan/atau berpretasi, meningkatnya isu kenaikan UKT PTN dan kendala pencapaian tridharma perguruan tinggi. Alokasi anggaran pendidikan yang memadai di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Myanmar, Kamboja, dan Laos sangat penting untuk

memastikan kualitas pendidikan yang baik. Dana yang cukup dapat digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas, memperbaiki fasilitas, meningkatkan kualitas pengajaran, dan mengembangkan kurikulum yang relevan. Meskipun anggaran meningkat dari tahun ke tahun, kesemua negara masih ada tantangan seperti disparitas kualitas pendidikan antar daerah, kekurangan guru, dan infrastruktur pendidikan yang buruk. Negara-negara di kawasan ASEAN memiliki pendekatan yang berbeda dalam alokasi anggaran, dengan fokus pada pendekatan desentralisasi, subsidi, dan investasi publik. Sementara upaya reformasi dan dukungan internasional seperti yang dilakukan oleh Bank Dunia di Kamboja dan Myanmar menunjukkan komitmen untuk memperbaiki akses dan kualitas pendidikan di negara-negara tersebut. Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura dan Thailand masih menjadi negara dengan alokasi anggaran maksimum baik pendidikan dasar menengah, tinggi dan Vokasi.

Secara khusus, Indonesia harus memandang alokasi anggaran sebagai Investasi SDM masa depan dan memprioritaskan alokasi anggaran berbasis berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan agar penyerapan anggaran maksimal dengan output jangka panjang untuk efisiensi alokasi anggaran berikutnya. Pada sub pendidikan dasar dan menengah, perbaikan kapabilitas daerah dalam diversifikasi program anggaran dan pengawasan komprehensif dari Pemerintah Pusat dan DPR RI menjadi sangat penting. Pemerintah Daerah perlu mempertimbangkan transformasi anggaran dalam program inovasi yang sesuai perkembangan peradaban pendidikan. Jika Pemerintah Daerah terus bertahan pada pengalokasian anggaran rutin yang tidak efisien, maka peningkatan kualitas pendidikan antar daerah akan terus timpang. Revisi terhadap alokasi anggaran perlu dilakukan secara berkala untuk mengakomodasi kebutuhan riil lapangan, termasuk peningkatan insentif bagi guru, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan kompetensi siswa. Indonesia dapat mencontoh Singapura dalam sistem alokasi anggaran berbasis kemandirian keluarga dan menjaga kualitas guru dengan pemberdayaan dan penghargaan. Pemerintah Pusat perlu mempertimbangkan kembali persoalan desentralisasi pendidikan melalui penegasan kewajiban daerah dalam pengelolaan anggaran pendidikan dari pusat agar tidak disalahgunakan dan mengakibatkan ketimpangan fundamental. Pada subsektor pendidikan tinggi dan vokasi Indonesia, pemerintah pusat memegang kendali penuh dalam realisasi anggaran. Pada Tahun 2023, bukti realisasi anggaran pendidikan tinggi dan vokasi semakin menunjukkan hasil peningkatan kualitas pendidikan dengan adanya konsep kampus merdeka. Hal ini menunjukkan keberhasilan diversifikasi alokasi anggaran pendidikan tinggi-vokasi melalui inovasi program adaptif perkembangan pendidikan dan kemitraan dengan pihak profesional. Akan tetapi, alokasi anggaran untuk pendidikan tinggi-vokasi perlu ditingkatkan secara signifikan agar memenuhi standar internasional. Rekomendasi dari UNESCO mengenai alokasi minimal 2% dari APBN perlu dipertimbangkan serius.

Studi ini telah berusaha mencapai tujuan komparasi Indonesia dengan negara ASEAN dan menunjukkan secara keseluruhan masih lebih baik dalam alokasi anggaran pendidikan. Akan tetapi, terdapat keterbatasan literatur dan dokumentasi data alokasi anggaran lebih detail. Hal ini membuka peluang kolaborasi PA3KN, Badan Keahlian, Setjen DPR RI bersama peneliti tata kelola anggaran Perguruan Tinggi dan profesional pendidikan dalam sharing resource penguatan DPR RI dalam transformasi kebijakan anggaran pendidikan Indonesia jauh lebih komprehensif. Studi ini diharapkan menjadi pembuka peluang studi lanjutan revitalisasi anggaran pendidikan dan peningkatan efektivitas implementasi kebijakan. Penelitian mendatang dapat mengeksplorasi efektivitas berbagai strategi yang diterapkan oleh negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, dalam mengatasi tantangan terkait alokasi anggaran pendidikan. Secara khusus, penelitian dapat memeriksa dampak kebijakan desentralisasi, subsidi, dan

investasi publik terhadap peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Studi perbandingan yang menganalisis tingkat keberhasilan berbagai pendekatan di seluruh wilayah tersebut dapat memberikan wawasan berharga bagi para pembuat kebijakan. Studi kedepan dapat menelusuri peran dukungan internasional, seperti pendanaan dari organisasi seperti Bank Dunia, dalam meningkatkan sistem pendidikan di negara-negara seperti Kamboja dan Myanmar, yang dapat memberikan pelajaran bagi negara-negara ASEAN lainnya. Dengan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan para ahli dan praktisi terkait, diharapkan tercipta kerangka kerja yang lebih komprehensif dalam mengelola dan mengalokasikan anggaran pendidikan secara lebih efektif dan efisien. Hal ini akan membawa dampak positif dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta memastikan kesetaraan akses bagi semua warga negara Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para reviewer yang telah meluangkan waktu untuk meninjau tulisan ini, serta kepada Redaktur Jurnal Budget atas kesempatan untuk berkontribusi pada edisi jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aguilar, F. (2017). Towards community formation in Southeast Asia? History education, ASEAN and the nation-state. *Sojourn*, 32(1), 137–169. <https://doi.org/10.1355/sj32-1e>
- Ahmad, M. I. (2020). Kajian Kritis Landasan Hukum Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia. *Antologi Pengembangan Pembiayaan Pendidikan Islam*, 39.
- Al Asari, M. R., & Hendra, H. (2024). Sumber Pendanaan Pendidikan. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 3(2), 21–30.
- Alifa, H. N., & Sulaeman, A. S. (2023). Perguruan Tinggi Negeri BLU di Indonesia; Pengelolaan Anggaran, Karakteristik, dan Peningkatan Kinerja. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 11(2), 401–416.
- Aliva, D., & Ilhamsyah, F. (2021). Efektivitas Alokasi Anggaran Pendidikan Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Di kabupaten Aceh Barat. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(8), 476–481.
- Alwi, A., & Gunarto, M. (2022). Analisa Kebijakan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Dalam Penyerapan Anggaran Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Ekonomi*, 3(1), 39–44.
- Ambariyanto, A., & Utama, Y. J. (2020). Educating Higher Education Institutions to Support SDGs: Indonesian Case. *E3S Web of Conferences*, 202. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020202015>
- Aminuddin, A., Harahap, A. S., & Dawi, M. N. (2021). Sistem Finansial Pendidikan di Indonesia (Analisis Tentang Signifikansinya Terhadap Pengelolaan Human Capital). *Hikmah*, 18(2), 119–130.
- Andari, T. W., Utami, A. D. W., Satrio, P. U. D., & Arif, S. (2023). Optimisme dalam Poster Digital Bonus Demografi pada Akun Instagram Presiden Joko Widodo. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(07), 534–543.

- Arzo, S., & Hong, M. (2024). A roadmap to SDGs-emergence of technological innovation and infrastructure development for social progress and mobility. *Environmental Research*, 246. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2024.118102>
- Asnawi, N., & Setyaningsih, N. D. (2020). Perceived service quality in Indonesian Islamic higher education context. *Journal of International Education in Business*, 13(1), 107–130. <https://doi.org/10.1108/JIEB-11-2019-0054>
- Boualaphet, K., & Goto, H. (2020). Determinants of school dropout in Lao People's Democratic Republic: A survival analysis. *Journal of International Development*, 32(6), 961–975.
- Budhrani, K. S., D'Amico, M. M., & Espiritu, J. L. D. (2017). Developing a Skilled Workforce Through Technical and Vocational Education and Training in the Philippines. In *Encyclopedia of Earth Sciences Series* (pp. 1–27). https://doi.org/10.1007/978-3-319-38909-7_28-1
- Budhrani, K. S., D'Amico, M. M., & Espiritu, J. L. D. (2018). Developing a Skilled Workforce Through Technical and Vocational Education and Training in the Philippines. In *Springer International Handbooks of Education: Vol. Part F1627* (pp. 693–718). https://doi.org/10.1007/978-3-319-50911-2_28
- Burton, L. O., & Salama, A. M. (2023). Sustainable Development Goals and the future of architectural education – cultivating SDGs-centred architectural pedagogies. *International Journal of Architectural Research: Archnet-IJAR*, 17(3), 421–442. <https://doi.org/10.1108/ARCH-08-2023-0201>
- Chankrajang, T., & Muttarak, R. (2017). Green Returns to Education: Does Schooling Contribute to Pro-Environmental Behaviours? Evidence from Thailand. *Ecological Economics*, 131, 434–448. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2016.09.015>
- Chanthy, K., & Saynasine, S. (2020). Higher Education Systems and Institutions, Lao People's Democratic Republic. In P. N. Teixeira & J. C. Shin (Eds.), *The International Encyclopedia of Higher Education Systems and Institutions* (pp. 1222–1227). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-017-8905-9_503
- Chapariha, M. (2022). Systems Dynamics Model of SDGs: A Case Study of Iran. *Challenges in Sustainability*, 10(1), 3–22. <https://doi.org/10.12924/cis2022.10010003>
- Dito, S. B., & Pujiastuti, H. (2021). Dampak revolusi industri 4.0 pada sektor pendidikan: kajian literatur mengenai digital learning pada pendidikan dasar dan menengah. *Jurnal Sains Dan Edukasi Sains*, 4(2), 59–65.
- Duanti, A. K., & Arifin, A. (2020). Pengaruh belanja fungsi pendidikan, belanja kesejahteraan sosial, belanja modal, dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di bidang pendidikan tahun 2018.
- Em, S., Khan, S., & Nun, N. (2022). Education system in Cambodia: A brief review from the prehistoric period to the present, and an education strategic plan for the future. *FIRE: Forum for International Research in Education*, 7(3), 141–164.
- Esson, J., & Wang, K. (2018). Reforming a university during political transformation: a case study of Yangon University in Myanmar. *Studies in Higher Education*, 43(7), 1184–1195. <https://doi.org/10.1080/03075079.2016.1239250>

- Fachrudin, K. A., & Sholihin, M. (2021). Examining the mediating effect of job satisfaction on the relationship between budgetary participation and organizational citizenship behavior in Indonesian higher education institutions. *Cogent Business and Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1968990>
- Fadhil, I., & Sabic-El-Rayess, A. (2021). Providing Equity of Access to Higher Education in Indonesia: A Policy Evaluation. *Indonesian Journal on Learning and Advanced Education (IJOLAE)*, 3(1), 57–75. <https://doi.org/10.23917/ijolae.v3i1.10376>
- Febrianto, M., & Esther, A. M. (2023). PENGARUH ANGGARAN PENDIDIKAN, ANGGARAN KESEHATAN, DAN TINGKAT KEMISKINAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 2841–2850.
- Firdaus, M. J. B., & Kresnawati, M. A. (2023). Indonesia Parliamentary Diplomacy: The Leadership of House Representatives Republic of Indonesia in ASEAN Inter- Parliamentary Assembly (AIPA) 2011- 2012. *WIMAYA*, 2(2), 39–47. <https://wimaya.upnjatim.ac.id/index.php/wimaya/article/view/115>
- Frattarola, A. (2023). A review of tertiary-level writing courses in Singapore: pedagogical approaches and practices. *Asia Pacific Journal of Education*, 43(2), 368–383. <https://doi.org/10.1080/02188791.2021.1914546>
- Gauthier, B., & Punyasavatsut, C. (2019). Inequalities in Presence of a School Funding Formula: The 15-year Free Education Program in Thailand. *International Journal of Educational Development*, 70. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2019.102100>
- Guo, S. (2020). The legacy effect of unexploded bombs on educational attainment in Laos. *Journal of Development Economics*, 147, 102527.
- Hauptman Komotar, M. (2020). Discourses on quality and quality assurance in higher education from the perspective of global university rankings. *Quality Assurance in Education*, 28(1), 78–88. <https://doi.org/10.1108/QAE-05-2019-0055>
- Ho, J., & Lee, Y.-J. (2022). Primary and Secondary Education in Singapore: Bringing Out the Best in Every Learner. In *Education in the Asia-Pacific Region* (Vol. 66, pp. 49–68). https://doi.org/10.1007/978-981-16-9982-5_4
- Hoang, L. (2019). Twin Privatization in Vietnam Higher Education: The Emergence of Private Higher Education and Partial Privatization of Public Universities. *Higher Education Policy*, 32(3), 359–380. <https://doi.org/10.1057/s41307-018-0086-8>
- Ilham, D., Karunia, L., Saleh, S., & Brata, J. T. (2023). Peran Pemerintah dalam Mendorong Kualitas Pelayanan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 5(2), 155–162.
- Ismail, F., Pawero, A. M. D., & Umar, M. (2021). Improving Educational Quality through Optimizing the Potential of Educational Institutions in Indonesia. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 2(1), 41–46.
- Jalal, A. (2020). DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA: STUDI PERILAKU ANGGOTA DALAM MELAKSANAKAN KEKUASAAN. *Ilmu Dan Budaya*, 41(68).
- Jarernsiripornkul, S., & Pandey, I. M. (2018). Governance of autonomous universities: case of Thailand. *Journal of Advances in Management Research*, 15(3), 288–305. <https://doi.org/10.1108/JAMR-12-2016-0103>

- Jones, G. M. (2016). Changing patterns of education in Brunei: How past plans have shaped future trends. In *The Use and Status of Language in Brunei Darussalam: A Kingdom of Unexpected Linguistic Diversity* (pp. 267–278). https://doi.org/10.1007/978-981-10-0853-5_17
- Juanda, J. (2021). Anomali Anggaran Pendidikan Dalam Pengaturan Dan Praktek. " Dharmasiswa" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(2), 18.
- Kamaludin, K. (2023a). Optimalisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi*, 1(1), 6–13.
- Kamaludin, K. (2023b). Optimalisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi*, 1(1), 6–13.
- Kandiko Howson, C., & Lall, M. (2020). Higher education reform in Myanmar: neoliberalism versus an inclusive developmental agenda. *Globalisation, Societies and Education*, 18(2), 109–124. <https://doi.org/10.1080/14767724.2019.1689488>
- Keerio, N., & Ahmad, A. R. (2023). Developing future leaders in Malaysian public universities: the factors influencing execution of succession planning. *Journal of Applied Research in Higher Education*. <https://doi.org/10.1108/JARHE-03-2023-0112>
- Kestin, T. S., Lumbreras, J., & Puch, M. C. (2023). Mobilizing higher education action on the SDGs: Insights from system change approaches. In *Higher Education and SDG17: Partnerships for the Goals* (pp. 27–49). <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85165007479&partnerID=40&md5=091d2ba5b07ac711b78dae30b04ad29e>
- Khairi, A., Ahmad, I., & Zainal, S. (2023). Sustainable Development Goals (SDGs) and education for Rohingya refugees in Malaysia. *Environment and Social Psychology*, 8(2). <https://doi.org/10.54517/esp.v8i2.1915>
- Khairunnisa, A., & Rahmatunnisa, M. (2022). Politik Anggaran di Tingkat Lokal. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 5(2), 82–92.
- Kioupi, V., & Voulvoulis, N. (2019). Education for sustainable development: A systemic framework for connecting the SDGs to educational outcomes. *Sustainability (Switzerland)*, 11(21). <https://doi.org/10.3390/su11216104>
- Kuraesin, E. (2024). Analisis Berbagai Peraturan tentang Pembiayaan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 3484–3892.
- Kushnir, I., & Nunes, A. (2022). Education and the UN Development Goals Projects (MDGs and SDGs): Definitions, Links, Operationalisations. *Journal of Research in International Education*, 21(1), 3–21. <https://doi.org/10.1177/14752409221088942>
- Lang, S. (2023). An analysis of non-formal primary equivalency programme outcomes and major factors affecting learners' learning achievements in Pursat province and Phnom Penh, Cambodia. *International Review of Education*, 69(3), 351–378. <https://doi.org/10.1007/s11159-023-10010-4>
- Lengkong, S. M. K., Rotinsulu, D. C., & Walewangko, E. N. (2019). Pengaruh alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18(5).

- Loganathan, T., Ong, Z. L., Hassan, F., Chan, Z. X., & Majid, H. A. (2023). Barriers and facilitators to education access for marginalised non-citizen children in Malaysia: A qualitative study. *PLoS ONE*, 18(6 June). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0286793>
- Mahamad, N. A., Shahimin, M. M., Romle, A. R., Zabri, M. A. H. M., Rodzi, S. M., & Ideris, M. S. K. (2016). Financial management analysis in the higher education institutions: Experience from Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) (2003-2012). *World Applied Sciences Journal*, 34(5), 571–580. <https://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2016.34.5.15695>
- Mail, A. H. A. H., Tengah, A. H. B. A. H., & Abu Bakar, H. T. H. (2019). History and development of Islamic education in Brunei Darussalam, 1900-1983: From home instruction to the religious primary school. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 5(2), 1082–1101. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85072616651&partnerID=40&md5=dbebf93a8dd08d10e2cc370fd9a20a3f>
- Marginson, S. (2011). Higher education in East Asia and Singapore: rise of the Confucian Model. *Higher Education*, 61(5), 587–611. <https://doi.org/10.1007/s10734-010-9384-9>
- Ma'sum, T., Jayanti, D., & Nikmah, D. M. (2023). Strategi Penyusunan Anggaran Pendidikan. *CERMIN: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Berbasis Islam Nusantara*, 3(1), 61–67.
- McGreal, R., & Olcott, D. (2022). A strategic reset: micro-credentials for higher education leaders. *Smart Learning Environments*, 9(1), 9. <https://doi.org/10.1186/s40561-022-00190-1>
- Mokher, C. G., & Mella-Alcazar, A. A. C. (2024). Improving education pathways: Collaboration supporting transitions from K-12 to postsecondary education in the Philippines. *International Journal of Educational Development*, 106. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2024.103003>
- Moxom, N., & Noonan, R. (2020). Post-Secondary and Higher Education. In R. Noonan (Ed.), *Education in the Lao People's Democratic Republic: On Track for the Twenty-First Century* (pp. 191–216). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-3319-8_8
- Muhammad, P. R., & Wiguna, A. B. (2023). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANGGARAN PENDIDIKAN DI INDONESIA TAHUN 2015-2021. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(4).
- Mumin, M. A. (2023). The Application of Code switching, Code mixing, and the need for Bilingual Pedagogy in Brunei Religious (Ugama) Schools: A Qualitative Study Involving Generation X and Millennial Teachers. *World Journal of English Language*, 13(8), 523–531. <https://doi.org/10.5430/wjel.v13n8p523>
- Nabaho, L., Turyasingura, W., Kiiza, A. K., Andama, F., & Beinebyabo, A. (2020). Quality Assurance of Higher Education Governance and Management: An Exploration of the Minimum Imperative for the Envisioned African Common Higher Education Space. *Higher Learning Research Communications*, 10(2). <https://doi.org/10.18870/hlrc.v10i2.1183>
- Nafindra, I. B., & Rifqi, A. (2022). Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada Jenjang Sekolah Dasar dan Menengah. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 10(3), 551–565.
- Nawn, N. (2015). For Sustainable SDGs: Righting Through Responsibilities. *Journal of Human Development and Capabilities*, 16(4), 625–630. <https://doi.org/10.1080/19452829.2015.1103713>

- Noonan, R., & Phommalangsy, P. (2020). Introduction to Education in Lao PDR. In *Education in the Asia-Pacific Region* (Vol. 51, pp. 1–29). https://doi.org/10.1007/978-981-15-3319-8_1
- Ogisu, T., & Williams, J. H. (2016). The Backstory of Education in Cambodia. In *International and Development Education* (pp. 15–34). https://doi.org/10.1057/9781137456007_2
- Omara, A. (2016). THE CONSTITUTIONALIZATION OF BUDGET FOR EDUCATION AND ITS JUDICIAL ENFORCEMENT IN INDONESIA. *Constitutional Review*, 2(2), 189–215. <https://doi.org/10.31078/consrev222>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *Systematic Reviews*, 10(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s13643-021-01626-4>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., & Moher, D. (2021). Updating guidance for reporting systematic reviews: development of the PRISMA 2020 statement. *Journal of Clinical Epidemiology*, 134, 103–112. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2021.02.003>
- Page, M. J., Moher, D., & McKenzie, J. E. (2022). Introduction to PRISMA 2020 and implications for research synthesis methodologists. *Research Synthesis Methods*, 13(2), 156–163. <https://doi.org/10.1002/jrsm.1535>
- Pellini, A., & Bredenberg, K. (2015). Basic education clusters in Cambodia: looking at the future while learning from the past. *Development in Practice*, 25(3), 419–432. <https://doi.org/10.1080/09614524.2015.1018138>
- Poon, K. K. (2022). Inclusive Education for Children with Special Educational Needs in Singapore Schools. In *Education in the Asia-Pacific Region* (Vol. 66, pp. 33–47). https://doi.org/10.1007/978-981-16-9982-5_3
- Pothisiri, W., Prasitsiriphon, O., & Aekplakorn, W. (2020). Extent of aging across education and income subgroups in Thailand: Application of a characteristic-based age approach. *PLoS ONE*, 15(12 December). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0243081>
- Purwaningrum, F., Md Arrif Lim, S., Evers, H.-D., & Ndah, A. (2014). The governance of knowledge: perspectives from Brunei Darussalam and Malaysia. Hans-Dieter and Ndah, Anthony, *The Governance of Knowledge: Perspectives from Brunei Darussalam and Malaysia* (July 1, 2014).
- Qi, X., Tan, A., & Gao, Y. (2022). Higher Education Teaching Quality Evaluation Model Based on Improved RBF Neural Network. *Wireless Communications and Mobile Computing*, 2022, 1–11. <https://doi.org/10.1155/2022/5495728>
- Ravet, J., & Mtika, P. (2024). Educational inclusion in resource-constrained contexts: a study of rural primary schools in Cambodia. *International Journal of Inclusive Education*, 28(1), 16–37. <https://doi.org/10.1080/13603116.2021.1916104>
- Rofiq, M., & Setiyadi, D. (2023). IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA. *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, 4(2), 30–42.

- Rohman, A., & Widowati, A. (2024). Political perspective on educational budget policy of the Special City government of Yogyakarta Indonesia. *Cakrawala Pendidikan*, 43(1), 182–191. <https://doi.org/10.21831/cp.v43i1.56111>
- Romdloni, M. (2021). PROBLEMATIKA PENDIDIKAN TINGGI, KURIKULUM DAN PENDIDIK DI INDONESIA. *Jurnal Al-Murabbi*, 7(1), 116–125.
- Rüland, J. rgen. (2013). Participation without Democratization: The ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) and ASEAN's Regional Corporatism. In O. Costa, C. Dri, & S. Stavridis (Eds.), *Parliamentary Dimensions of Regionalization and Globalization: The Role of Inter-Parliamentary Institutions* (pp. 166–186). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/9781137322746_9
- Rustiningrum, S., & Digdowiseiso, K. (2023). ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) DI INDONESIA. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 10(2), 800–813.
- Safira, N., & Wibowo, Y. H. (2021). Angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni sebagai indikator keberhasilan pendidikan indonesia. *PAKAR Pendidikan*, 19(2), 101–115.
- Salleh, S. M., & Laxman, K. (2014). Investigating the factors influencing teachers' use of ICT in teaching in Bruneian secondary schools. *Education and Information Technologies*, 19(4), 747–762. <https://doi.org/10.1007/s10639-013-9251-2>
- Sangiumvibool, P., & Chonglertham, S. (2017). Performance-based budgeting for continuing and lifelong education services: the Thai higher education perspective. *Journal of Higher Education Policy and Management*, 39(1), 58–74. <https://doi.org/10.1080/1360080X.2016.1211977>
- Santoso, M. S. A. F. (2021). Analisis anggaran pendapatan belanja negara (APBN) terhadap pendanaan kebijakan pendidikan. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 31–36.
- Saputra, A. (2018). Allocation of Education Budget in Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 1(2), 141–147. <https://doi.org/10.33258/birci.v1i2.19>
- Sarabia-Panol, Z., & Sison, M. D. (2016). We are what we teach: The impact of persuasive communication on Philippine PR history and contemporary PR education. *Public Relations Review*, 42(5), 801–811. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2016.03.004>
- Selcuk, A. A. (2019). A Guide for Systematic Reviews: PRISMA. *Turkish Archives of Otorhinolaryngology*, 57(1), 57–58. <https://doi.org/10.5152/tao.2019.4058>
- Shahrill, M., & Keasberry, C. (2021). Higher Education in Brunei Darussalam. In L. P. Symaco & M. Hayden (Eds.), *International Handbook on Education in South East Asia* (pp. 1–27). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-8136-3_48-1
- Soe, K., Holland, P., & Mateus, C. (2019). Association Between Maternal Education and Childhood Mortalities in Myanmar. *Asia-Pacific Journal of Public Health*, 31(8), 689–700. <https://doi.org/10.1177/1010539519888299>
- Soeparno, M. E. D. (2022). Political Budgeting Dynamics: Executive-Legislative Interaction for COVID-19 Budget Policy in Indonesia and Singapore [Dinamika Politik Anggaran: Interaksi

- Eksekutif-Legislatif dalam Kebijakan Anggaran Penanganan COVID-19 di Indonesia dan Singapura]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 13(1), 21–42.
- Sok, S., & Bunry, R. (2021). Internationalization of higher education in Cambodia: toward an agenda for higher education development. *International Journal of Comparative Education and Development*, 23(3), 193–211. <https://doi.org/10.1108/IJCED-08-2020-0049>
- Sripokangkul, S. (2020). Education for the production and re-production of docile bodies: The problems of civic education in Thailand. *Intellectual Discourse*, 28(1), 261–294. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85088361933&partnerID=40&md5=e40559ef57d7110fa4f50386ac068c80>
- Sudarmono, S., Hasibuan, L., & Us, K. A. (2020). Pembiayaan pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 266–280.
- Sukmayadi, V., & Yahya, A. H. (2020). Indonesian education landscape and the 21st century challenges. *Journal of Social Studies Education Research*, 11(4), 219–234.
- Sulasmi, E., Prasetia, I., & Rahman, A. A. (2023). Government Policy Regarding Education Budget On The Posture Of The State Budget (APBN) In 2023. *Journal for Lesson and Learning Studies*, 6(1).
- Sutikno, A. N. (2020). Bonus demografi di indonesia. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 12(2), 421–439.
- Syahirah, S., Osman, S. F., Adnin, N. A., & Roseli, N. R. M. (2023). Assessing The Impacts of Community-Based Technical Education and Training Projects in Northern Malaysia. *Journal of Technical Education and Training*, 15(3), 224–234. <https://doi.org/10.30880/jtet.2023.15.03.020>
- Tan, C. Y. (2022). Influence of Cultural Values on Singapore School Leadership. *Educational Management Administration & Leadership*, 52(2), 280–303. <https://doi.org/10.1177/17411432211073414>
- Tan, J. (2021). Higher Education in Singapore. In L. P. Symaco & M. Hayden (Eds.), *International Handbook on Education in South East Asia* (pp. 1–17). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-8136-3_8-1
- Tegnan, H. (2018). Analysis of the Indonesian presidential system based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21(3). <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85055187699&partnerID=40&md5=604456d7ee6b0a54e6787f6819deab22>
- Thamrin, Husni. (2020). Educational Aspects in Efforts to Realize SDGs in Indonesia. *Journal of Advances in Education and Philosophy*, 4(11), 473–477. <https://doi.org/10.36348/jaep.2020.v04i11.007>
- Thein, A. T. Z., & Akita, T. (2019). Education and expenditure inequality in Myanmar: An analysis with the 2006 and 2012 Household Income and Expenditure Survey in an urban and rural setting. *Regional Science Policy and Practice*, 11(1), 55–70. <https://doi.org/10.1111/rsp3.12188>

- Tuangratananon, T., Suphanchaimat, R., Julchoo, S., Sinam, P., & Putthasri, W. (2019). Education policy for migrant children in Thailand and how it really happens; A case study of Ranong Province, Thailand. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(3). <https://doi.org/10.3390/ijerph16030430>
- Tun, E., Ong, Y. S., & Lee, Y.-J. (2023). STEM education for primary schools: A topic modelling study of STEM applied learning programme websites in Singapore. In *Cross-disciplinary STEM Learning for Asian Primary Students: Design, Practices, and Outcomes* (pp. 178–201). <https://doi.org/10.4324/9781003262237-11>
- Tung, D. T., Hung, N. T., Phuong, N. T. C., Loan, N. T. T., & Chong, S.-C. (2020). Enterprise development from students: The case of universities in Vietnam and the Philippines. *International Journal of Management Education*, 18(1). <https://doi.org/10.1016/j.ijme.2019.100333>
- Ulfah, S. M. (2021a). Mencermati Arah Pendidikan Indonesia. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 1(2), 1–9.
- Ulfah, S. M. (2021b). Mencermati Arah Pendidikan Indonesia. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 1(2), 1–9.
- Un, L., & Sok, S. (2022). (Higher) Education Policy and Project Intervention in Cambodia: Its Development Discourse. In V. McNamara & M. Hayden (Eds.), *Education in Cambodia: From Year Zero Towards International Standards* (pp. 215–239). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-8213-1_12
- Võ, M. T. H., & Laking, R. (2020). An institutional study of autonomisation of public universities in Vietnam. *Higher Education*, 79(6), 1079–1097. <https://doi.org/10.1007/s10734-019-00457-6>
- Wahyuni, S., & Hernusa, H. L. (2021). Tinjauan Proses Penyusunan Anggaran Belanja Pada Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 1(2), 219–230.
- Waruwu, M. (2021). A Strategi Pembiayaan Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Era Pandemi Covid 19: Sekolah Swasta. *Sapientia Humana: Jurnal Sosial Humaniora*, 1(02), 15–25.
- Wicaksono, J. A. (2021). Kebijakan Pendidikan Nasional Perspektif Pembiayaan Pendidikan. *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial*, 8(2), 375–407.
- Yaniar, S. A., Simamora, N. B. A., Kosasih, S. F., & Anwar, D. P. (2022). Evaluasi Penganggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: Kebijakan Program Kampus Merdeka Tahun 2020 dan 2021. *JPPol: Jurnal Poros Politik*, 4(3), 7–17.
- Yulistiyono, A., Gunawan, E., Widayati, T., Firmansyah, H., Malau, N. A., Megaster, T., Ekopriyono, A., Nurhayati, T. P. T., Siahaan, A. L. S., & Suharno, S. (2021). *Bonus Demografi sebagai peluang Indonesia dalam percepatan pembangunan ekonomi* (Vol. 1). Penerbit Insania.
- Zimmermann, T., & Williams, J. H. (2016). Does Students' Gender Matter? Parents' Educational Expectations, Their Determinants, and Consequences in Explaining Students' Dropout in an Area in Cambodia. In *International and Development Education* (pp. 123–142). https://doi.org/10.1057/9781137456007_7

Zobrist, B., & McCormick, P. (2017). Primary and secondary education in Myanmar: Challenges facing current reforms. In *Education and Globalization in Southeast Asia: Issues and Challenges* (pp. 166–194). <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85058091992&partnerID=40&md5=1fd2f82495f151f51d177d2a689e79e0>